annual report

2021

Bank Palembang

PT.Bank Perkreditan Rakyat Palembang

PT BANK PERKRDITAN RAKYAT PALEMBANG
Jl. R. Sukamto No. 2 C-D Palembang



Kata **Pengantar**

Annual Report 2021 atau Laporan Keuangan Tahunan 2021 merupakan dokumen tahunan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Annual Report bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang lebih dikhususkan sebagai dokumen pelaporan formal untuk kalangan terbatas. Oleh karena itu, sistematika dan materi yang disajikan juga relatif lebih dimaksudkan untuk mengikuti pola sistematika yang telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Secara konten, materi dan data pada buku ini lebih difokuskan pada pelaporan kinerja perusahaan dalam aspek kinerja keuangan. Data laporan keuangan yang disajikan pada Bab tersendiri merupakan data-data hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik. Selain data kinerja keuangan, pada beberapa Bab sebelumnya, disajikan pula gambaran umum perusahaan, beberapa pencapaian kinerja kualitatif seperti program-program pengembangan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan kebijakan strategis tentang pengembangan pasar dan jaringan.

Akhirnya, harus kami sampaikan bahwa penyusunan Annual Report 2021 ini tentu masih menyisakan beberapa kekurangan. Untuk itu, kami sangat terbuka dengan koreksi dan perbaikan konstruktif dari pihak-pihak terkait demi penyempurnaan penyusunan laporan serupa di masa mendatang.

Palembang, 25 April 2022
PT BPR Palembang

SYAFRIL
Direktur Utama



Sambutan **Dewan Komisaris**

Mencermati data-data kinerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang sebagaimana disajikan pada Annual Report 2021, kami menyoroti terjadi perbaikan pada beberapa aspek kinerja, namun di beberapa aspek kenerja lainnya terjadi penurunan. Kebijakan-kebijakan Perseroan yang diambil sepanjang tahun 2021 secara signifikan dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Akan tetapi, kami percaya, seluruh kebijakan manajemen sepanjang tahun 2021 telah berada pada jalur yang tepat.

Sepanjang tahun 2021 pertumbuhan aset mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen yaitu menjadi Rp.87.103.962 ribu dibandingkan dengan posisi aset pada tahun 2020 sebesar Rp.86.176.372 ribu. Sepanjang tahun 2021 PT BPR Palembang mengalami kerugian sebesar Rp.4.588.210 ribu, sedangkan tahun 2020 PT BPR Palembang berhasil laba sebesar Rp.569.050 ribu.

Harus diakui, pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan BPR, terutama pada aspek perkreditan. Disamping itu, persaingan ketat dengan bank lain memaksa BPR harus berbagi pasar dengan BPR dan Bank Umum yang sudah memiliki unit-unit ritel di sektor UMKM. Di tengah persaingan yang nampak tidak seimbang ini, BPR harus melakukan upaya sungguh-sungguh dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang meliputi asas-asas: (1) *transparancy*, (2) *accountability*, (3) *responsibility*, (4) *independency*, dan (5) *fairness*.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan dan menjalin kerja sama dengan PT BPR Palembang. Apresiasi kami sampaikan juga kepada Direksi & segenap staff, yang telah bekerja secara maksimal sepanjang tahun 2021.

Palembang, 25 April 2022
PT. BPR Palembang

Drs. H. A. Wahid Syukur
Komisaris Utama

Daftar **ISI**

KATA PENGANTAR i
SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS ii
DAFTAR ISI iii
VISI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG..... v
MISI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG..... vi

Bagian Kesatu

PENDAHULUAN

1. Sejarah Pendirian Perusahaan 1
2. Perizinan Usaha 2
3. Bidang Usaha 2
4. Kedudukan dan Pusat Operasi..... 3
5. Susunan dan Profil Pengurus..... 4
6. Profil Pejabat Eksekutif 6
7. Kepemilikan 8
8. Struktur Organisasi 9

Bagian Kedua

LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA

1. Kinerja Keuangan 2021 10
   a Pertumbuhan Total Aset 10
   b. Pertumbuhan Pendapatan 11
   c. Beban Operasional 12
   d. Laba (Rugi) Usaha..... 14
2. Rasio-Rasio Keuangan 15
3. Penanganan Kredit Bermasalah..... 16

Bagian Ketiga

LAPORAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN

1. Aktivitas Utama 21
   a. Penghimpunan Dana 21
      1). Tabungan 21
      2). Deposito Berjangka 22
      3). Antarbank Passiva 22
   b. Penyaluran Dana 22

Bagian Keempat

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN

1. Kebijakan-kebijakan Perusahaan 24
a. Penguatan Institusi Internal 24
b. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Termasuk Bonus, Tantiem dan Fasilitas Lain..... 25
c. Pengembangan Jaringan Pemasaran 25
d. Peningkatan Kualitas SDM 25
e. Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Teknologi Informasi..... 27
f. Penguatan Jaringan dan Kerjasama Eksternal 28
2. Implementasi Manajemen Risiko 29
a. Risiko Kredit 29
b. Risiko Likuiditas 29
c. Risiko Operasional 29
d. Risiko Kepatuhan..... 29
3. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 30
4. Perubahan Penting Lain yang Terjadi di BPR yang Mempengaruhi Operasional BPR 31
5. Corporate Social Responsibility (CSR) 32

Bagian Kelima

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Audit Independen 33
2. Neraca 41
3. Laporan Laba Rugi 43
4. Laporan Perubahan Ekuitas 44
5. Laporan Arus Kas 45
6. Catatan-Catatan Atas Laporan Keuangan..... 47

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 Kualitas Aktiva Produktif
Lampiran 2 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
Lampiran 3 Capital Adequacy Ratio
Lampiran 4 Loan to Deposit Rasio
Lampiran 5 Cash Ratio
Lampiran 6 Rasio Return on Aset dan BOPO

Visi **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG**

“Menjadi BPR yang sehat dan kuat serta tumbuh dan berkembang pesat”

Misi **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG**

- Menghimpun dana pihak ketiga sebagai sumber dana untuk membiayai operasional BPR.
- Memperkuat permodalan BPR yang berasal dari laba usaha maupun yang berasal dari setoran modal.
- Menyalurkan kredit sesuai dengan rencana kerja dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- Menjaga kualitas aktiva produktif agar tetap memiliki aktiva produktif yang sehat.
- Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada SDM sehingga memiliki SDM yang professional, jujur dan berintegritas tinggi.
- Memahami risiko perbankan dan mengendalikan resiko tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan.
- Mematuhi peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Bagian Kesatu

Pendahuluan

1. Sejarah Pendirian Perusahaan

Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat disingkat PT BPR Pendanaan Sarana Rakyat atau disingkat / disebut BANK PASAR yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yaitu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor : 14 tanggal 08 April 2013 dihadapan Notaris Ny. Siti Hikmah Nuraini, SH dan telah mendapat pengesahaan Badan Hukum Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-28879.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 29 Mei 2013.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain :

- Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 01 tanggal 05 Oktober 2017 tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat telah mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0021188.AH.01.02 tanggal 12 Oktober 2017.
- Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 01, tanggal 1 November 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0262222 pada tanggal 09 November 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, sehingga modal disetor PT Bank Perkreditan Rakyat berubah menjadi Rp.38.000.000 ribu dari sebelumnya sebesar Rp.25.000.000 ribu.
- Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 34 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pernyataan Keputusan secara Sirkuler para Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang yang diantara keputusan dari para Pemegang Saham yaitu mengesahkan dan mengangkat Bapak Syafril sebagai Direktur Utama Perseroan.

- Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 7 tanggal 11 Mei 2020 tentang Akta Pernyataan secara Sirkuler para Pemegang Saham PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0241356 pada tanggal 09 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan nomor AHU-AH.01.03-0241359 pada tanggal 09 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Salah satu keputusan di dalam Akta No. 7 tersebut yaitu terjadi pengalihan kepemilikan saham yang dimiliki Ir. Ahmad Syafriar kepada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya sebanyak 600 lembar saham atau nominal Rp. 60 juta.
- Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 01 tanggal 06 Januari 2021 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa PT BPR Palembang dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0063565 pada tanggal 01 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan nomor AHU-AH.01.03-0063566 pada tanggal 01 Februari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Dalam Akta tersebut, terkait masa jabatan Pengurus maka RUPS Luar Biasa memutuskan untuk memberhentian dan mengangkat kembali Pengurus yang habis masa jabatannya (perpanjangan masa jabatan).

2. Perizinan usaha

PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang mulai beroperasi pada tanggal 18 Januari 2016 dan dalam menjalankan usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang memiliki perizinan usaha sebagai berikut :

a. Surat Izin Prinsip dari Bank Indonesia tanggal 26 Maret 2013 dengan Nomor 15/83/DKBU.
b. Surat Izin Gangguan No: 503/IG.R/7451/BPM-PTSP/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 07 Desember 2015.
c. Nomor Pokok Wajib Pajak dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur, dengan Nomor NPWP: 02.298.251.4-301.000.
d. Izin Usaha dari Otoritas Jasa keuangan NOMOR KEP-85/d.03/2015.
e. Izin Perubahan Nama BPR dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-56/KR.07/2017.

3. Bidang Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang Bank Perkreditan Rakyat dengan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
b. Memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah.
c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
d. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kedudukan dan Pusat Operasional

Perseroan berdomisili di Palembang dengan alamat Jl. R. Sukamto No. 2 C-D, RT.042 RW. 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang 30114, Sumatera Selatan, Indonesia dan belum memiliki Kantor Cabang maupun Kantor Kas.

Kontak yang dapat dihubungi melalui :

No. Telp. : (0711) 5630086 / 5630092
Website : bankbprpalembang.com
email : bprpalembang@bankbprpalembang.com

5. Susunan dan Profil Pengurus

a. **Drs. H. Abdul Wahid Syukur :** Komisaris Utama



Lahir di Bintuhan, Bengkulu 19 Januari 1948, saat ini tinggal di Palembang. Beliau adalah Alumnus Doktorandus Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 1986. Beliau telah menyelesaikan sertifikasi sebagai Komisaris pada tahun 2016. Pensiunan ASN Kota Palembang ini, lama berkarier pada Inspektorat Kota Palembang dengan jabatan terakhir sebagai Inspektur. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013.

b. **Drs. H. Sumirin T. Tjinto** : Komisaris



Lahir di Tanjung Sakti, 16 April pada tahun 1952. Beliau adalah Doktorandus Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 1988. Beliau telah menyelesaikan sertifikasi sebagai Komisaris pada tahun 2016. Selain menjabat komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, beliau juga merupakan Direktur Keuangan pada PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya. Karir pada dunia perbankan telah dimulainya sejak tahun 1974 di Bank Sumsel Babel dengan jabatan terakhir sebagai Direktur I pada tahun 1997-2001 dan Pjs. Direktur Utama pada tahun 1999.

c. **Syafril** : Direktur Utama



Lahir di Padang Panjang, 29 Maret 1967. Menempuh studi Administrasi Negara di STIA BNM Pariaman pada tahun 2005 dengan gelar Sarjana Sosial. Beliau telah lulus Sertifikasi Direksi BPR sejak tahun 2005. Karir dalam dunia perbankan dimulai sejak tahun 1990 pada PT BPR Rangkiang Nagari, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat dengan berbagai posisi jabatan. Bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang sejak tanggal 13 Desember 2019 dengan jabatan sebagai Direktur Utama.

d. **Slamet** : Direktur



Lahir di Musuk, 14 Mei 1969. Menempuh studi ekonomi pada Universitas Widya Gama Malang tahun 1996 dan lulus Sertifikasi Direksi BPR pada tahun 2011. Pengalaman dalam dunia perbankan ditekuninya sejak tahun 2008 sebagai Kepala Bagian Marketing pada BPR Tunas Jaya Graha Lampung. Bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang sejak tahun 2013 dengan jabatan sebagai Direktur.

6. Profil Pejabat eksekutif

a Eko Karnain : Manager Operasional



Lahir di Bailangu, 18 Maret 1981, saat ini tinggal di Palembang. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Sriwijaya dengan jurusan Akuntansi pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang pernah menjadi Internal Control Unit pada Bank Yudha Bhakti KC Palembang dari tahun 2007 hingga tahun 2010 dan kemudian sebagai auditor pada tahun 2010 s/d 2013.

b Ratih Puspa Dewi : Manager Credit Support



Lahir di Jambi pada tanggal 02 November 1983. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang, pernah bekerja pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya pada bagian Business Development, kemudian dilanjutkan pada PT. Pembangkit Listrik Palembang Jaya sebagai Manager Administrasi dan Keuangan.

c Alfanni Chondri Dopong : Manager Kredit Produktif



Lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 13 Juni 1980. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, pernah menjabat sebagai Branch Manager pada Bank BTPN pada rentang waktu antara tahun 2011–2014, 2015-2017, dan sebagai Area Manager pada tahun 2014-2015.

d. Belly Guntur Putra : Manager Kredit Konsumtif



Lahir di Palembang pada tanggal 11 Desember 1984. Berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2008 di Universitas Sriwijaya. Sebelum bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, pernah bekerja pada Bank Mandiri sebagai Mikro Kredit Sales pada tahun 2009 s/d 2011. Selanjutnya pada tahun 2011 s/d 2013 bekerja sebagai Account Officer Ritel pada Bank BRI. Pengalaman di bidang perbankan berikutnya pernah bergabung dengan PT. Bank Sinarmas pada tahun 2013 sebagai Marketing Officer Micro Small Medium Enterprise (MSME).

e. Dani Aminudin : Manager SDM – Umum dan Informasi Teknologi



Lahir di Palembang pada tanggal 22 april 1975, merupakan anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara. Menyelesaikan pendidikan pada Universitas Gunadarma Jakarta pada tahun 1997 dengan jurusan Sistem Informasi. Pengalaman bekerja di bidang informasi teknologi dimulai dari tahun 2001 hingga bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang pada tahun 2013.

f. Chris Purwanto : PE Audit Intern



Lahir di Lahat / Batu Rancing pada tanggal 06 Maret 1979. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2005. Sebelum bergabung dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang, pernah bekerja pada PT. Federal International Finance sebagai CR Field dari tahun 2006 s/d 2014 dan PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya pada bagian Satuan Pengawasan Intern pada tahun 2014 s/d 2015.

g. Orita : PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Petugas Khusus APU & PPT



Lahir di Palembang pada 27 Oktober 1989. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2012 dari Universitas Sriwijaya. Pengalaman di perbankan dimulai pada tahun 2012 s/d 2015 di Bank Sinarmas di bagian SKAI. Selanjutnya pada tahun 2015 s/d 2017 bekerja sebagai Broker dan Staff SDM pada PT Valbury Securitas. Hingga pada tahun 2017 – sekarang bergabung di PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang sebagai PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT.

7. Kepemilikan

Modal dasar Perseroan pada saat didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 14 tanggal 8 April 2013 dihadapan Notaris Ny. Siti Hikmah Nuraini, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-28879.AH.01.01.Tahun 2013 Tanggal 29 Mei 2013 adalah sebesar Rp.24.000.000.000,- Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor sebesar 25% atau sejumlah Rp.6.000.000.000,- yang terbagi atas 99,00% dimiliki oleh PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dan 1,00% dimiliki oleh Ir. Ahmad Syafriar. Modal Dasar dan Modal Disetor Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut:

No.	Tanggal Efektif	Modal Dasar Perseroan	Modal Disetor
1.	08 April 2013	Rp. 24.000.000.000,-	Rp. 6.000.000.000,-
2.	27 Mei 2016	Rp. 24.000.000.000,-	Rp. 12.000.000.000,-
3.	05 Desember 2016	Rp. 100.000.000.000,-	Rp. 25.000.000.000,-
4.	27 November 2018	Rp. 100.000.000.000,-	Rp. 38.000.000.000,-

Perubahan modal dasar Perseroan dari Rp.24.000.000.000,- menjadi Rp.100.000.000.000,- dan penambahan setoran modal dari Rp.25.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.38.000.000.000,- telah disahkan melalui Akta No. 1 tanggal 1 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Siti Hikmah Nurani, SH. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0262222 pada tanggal 9 November 2018.

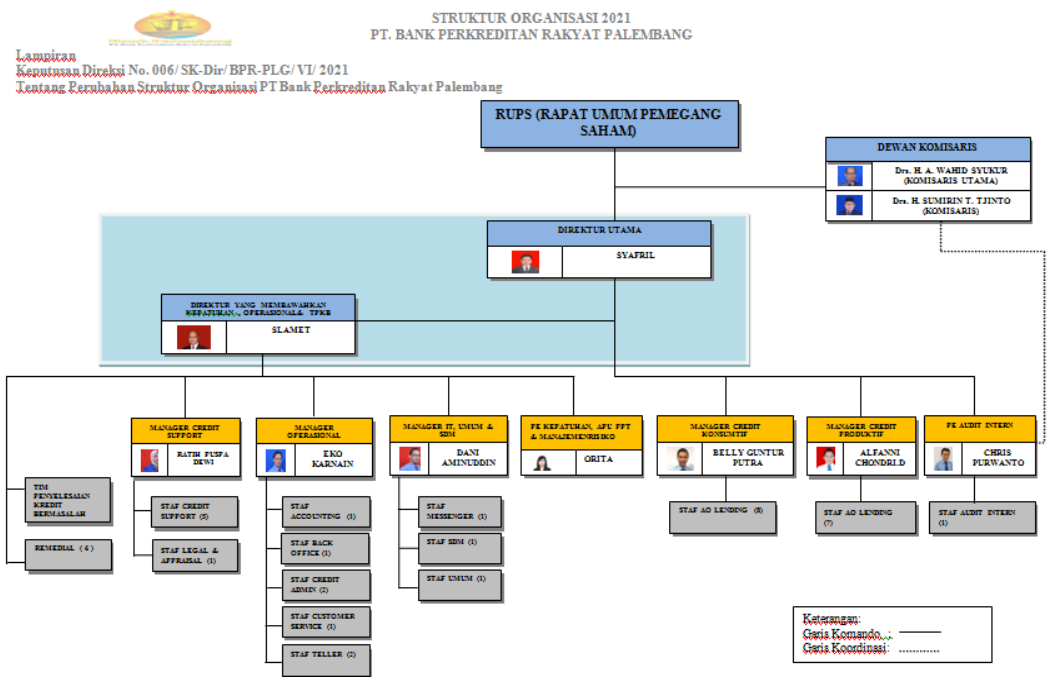
Susunan Pemegang Saham dan Komposisi Pemegang Saham posisi 01 November 2018 :

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Saham	Jumlah Saham (Rp)
1.	Pemerintah Kota Palembang	260.000 lembar	68,42	Rp. 26.000.000.000,-
2.	PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya	119.400 lembar	31,42	Rp. 11.940.000.000,-
3.	Ir Ahmad Syafriar	600 lembar	0,16	Rp. 60.000.000,-
TOTAL		**380.000 lembar**	**100,00**	**Rp. 38.000.000.000,-**

Selanjutnya dalam perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Notaris No. 07 tanggal 11 Mei 2020 di hadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH, dinyatakan RUPS menyetujui pengalihan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tuan Insinyur Ahmad Syafriar sebanyak 600 (enam ratus) saham di BPR Palembang kepada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, sehingga kepemilikan saham berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	% Saham	Jumlah Saham (Rp)
1.	Pemerintah Kota Palembang	260.000 lembar	68,42	Rp. 26.000.000.000,-
2.	PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya	120.000 lembar	31,58	Rp. 12.000.000.000,-
TOTAL		**380.000 lembar**	**100,00**	**Rp. 38.000.000.000,-**

8. Struktur Organisasi



Struktur Organisasi PT BPR Palembang pada tahun 2021 ditetapkan melalui SK Direksi No. 006/SK-Dir/BPR-PLG/VI/2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang.

Bagian Kedua

Laporan Perkembangan Usaha

1. Kinerja Keuangan Tahun 2021

Perkembangan kinerja operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang diukur dari kinerja keuangannya menunjukan perbaikan pada beberapa aspek kinerja, namun di beberapa aspek kenerja lainnya terjadi penurunan. Kebijakan-kebijakan Perseroan yang diambil sepanjang tahun 2021 secara signifikan dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Sampai dengan akhir tahun 2021, total aset PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang adalah sebesar Rp.87.103.962 ribu dan mengalami kerugian selama tahun 2021 sebesar Rp.4.588.210 ribu. Secara kumulatif saldo laba (rugi) di neraca posisi 31 Desember 2021 tercatat rugi sebesar Rp.9.050.491 ribu. Saldo rugi tersebut terjadi sebagian besar karena adanya kerugian yang dialami pada tahun 2016 sebesar Rp.5.986.094 ribu. Kerugian tersebut terjadi akibat pembebanan biaya-biaya pra-operasional (biaya pendirian) sejak tahun 2009 s/d Desember 2015 yang harus dibebankan sekaligus pada tahun pertama operasional dan tidak boleh ditangguhkan sehingga biaya pra-operasional (biaya pendirian) dibebankan pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang efektif beroperasi.

a. Pertumbuhan Aset

Total aset yang berhasil dicapai pada tahun 2021 dibandingkan dengan pencapaian aset pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.927.591 ribu atau naik sebesar 1,08 persen. Pada 31 Desember 2021 aset tercatat sebesar Rp.87.103.962 ribu sedangkan pada 31 Desember 2020 aset tercatat sebesar Rp.86.176.372 ribu.

b. Pertumbuhan Pendapatan

1) Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang terdiri dari pendapatan bunga antar bank aktiva (tabungan, giro dan deposito) dan pendapatan bunga kredit. Pada posisi 31 Desember 2021 pendapatan bunga tercatat sebesar Rp.12.096.650 ribu yang terdiri dari pendapatan bunga tabungan sebesar Rp.92.745 ribu, jasa giro sebesar Rp.228.103 ribu, pendapatan bunga deposito sebesar Rp.1.381.406 ribu dan pendapatan bunga kredit sebesar Rp.10.394.395 ribu. Sedangkan posisi 31 Desember 2020 pendapatan bunga yang berhasil dicapai sebesar Rp.13.306.856 ribu sehingga terjadi penurunan sebesar Rp.1.210.207 ribu atau turun 9,09 persen.

2) Pendapatan Provisi & Administrasi

Total pendapatan provisi dan administrasi kredit tahun 2021 adalah sebesar Rp.744.975 ribu. Sedangkan tahun 2020 pendapatan provisi dan administrasi kredit sebesar Rp.882.277 ribu sehingga terjadi penurunan sebesar Rp.137.302 ribu atau turun 15,56 persen.

3) Biaya Transaksi

Total biaya transaksi tahun 2021 adalah sebesar Rp.227.030 ribu sedangkan biaya transaksi tahun 2020 adalah sebesar Rp.335.132 ribu sehingga terjadi penurunan sebesar Rp.108.102 ribu atau -32,26 persen. Biaya transaksi tersebut merupakan biaya transaksi kredit yang diberikan kepada bank lain sebesar Rp.29.684 ribu dan kepada pihak ketiga bukan bank sebesar Rp.197.346 ribu.

4) Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.963.366 ribu yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi sebesar Rp.1.804 ribu, pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapus buku sebesar Rp.174.524 ribu, pendapatan pemulihan penyisihan penghapusan aktiva produktif sebesar Rp.419.921 ribu dan pendapatan lainnya yaitu sebesar Rp.367.117 ribu. Sebagai perbandingan pada posisi 31 Desember 2020 PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang membukukan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp.791.490 ribu sehingga terjadi kenaikan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp.171.877 ribu atau naik 21,72 persen.

5) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional tahun 2021 yang diperoleh sebesar Rp.37.451 ribu sedangkan pendapatan non operasional lainnya tahun 2020 sebesar Rp.30.154 ribu sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp.7.297 ribu atau naik 24,20 persen.

Ringkasan Kinerja Keuangan 2021 vs 2020

dalam ribuan rupiah

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
Total Aset	87,103,962	86,176,372
Dana Pihak Ketiga	41,867,380	35,850,984
Kredit Yang Diberikan	49,891,171	59,825,581
NPL	18.28%	18.70%
Modal Disetor	38,000,000	38,000,000
Total Pendapatan	13,615,412	14,675,646
Total Biaya	18,203,622	14,106,596
Laba (Rugi) Tahunan	(4,588,210)	569,050

c. Beban Operasional

1) Beban Bunga

Beban bunga yang terjadi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.3.716.867 ribu sedangkan beban bunga tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.767.661 ribu sehingga terjadi penurunan beban bunga sebesar Rp.1.050.794 ribu atau turun 22,04 persen. Beban bunga tahun 2021 sebesar Rp.3.716.867 ribu terdiri atas beban bunga tabungan sebesar Rp.277.890 ribu, beban bunga deposito sebesar Rp.2.307.679 ribu, beban bunga simpanan dari bank lain sebesar Rp.1.025.178 ribu dan beban premi penjaminan LPS sebesar Rp.106.120 ribu.

2) Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Beban penyisihan penghapusan aset produktif (beban PPAP) pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.6.798.366 ribu sedangkan pada tahun 2020, beban PPAP sebesar Rp. 1.676.046 ribu sehingga terjadi kenaikan beban PPAP sebesar Rp.5.122.320 ribu atau naik 305,62 persen.

3) Beban Tenaga Kerja

Beban tenaga kerja yang terjadi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.5.733.745 ribu, yang terdiri dari biaya gaji dan upah sebesar Rp.4.203.373 ribu, honorarium dewan komisaris sebesar Rp.612.807 ribu, dan biaya tenaga kerja lainnya sebesar Rp.917.566 ribu. Sedangkan beban tenaga kerja yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.631.986 ribu sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp.101.759 ribu atau naik 1,81 persen.

4) Beban Pendidikan dan Pelatihan

Beban pendidikan dan pelatihan yang terjadi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.28.953 ribu. Biaya pendidikan dan pelatihan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill pengurus dan karyawan BPR sepanjang tahun 2021. Sedangkan beban pendidikan dan pelatihan yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 162.787 ribu sehingga terjadi penurunan sebesar Rp.133.834 ribu atau turun 82,21 persen. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir menyebabkan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan secara daring sehingga penggunaan biaya pendidikan dan pelatihan menurun dibandingkan periode sebelumnya.

5) Beban Sewa

Beban sewa yang terjadi selama tahun 2021 adalah sebesar Rp.613.263 ribu, yang terdiri dari sewa gedung kantor sebesar Rp.324.500 ribu dan sewa lainnya sebesar Rp.288.763 ribu. Sedangkan beban sewa yang terjadi selama tahun 2020 adalah sebesar Rp. 575.953 ribu sehingga naik sebesar Rp.37.310 ribu atau naik 6,48 persen.

6) Beban Penyusutan dan amortisasi

Beban penyusutan tahun 2021 adalah sebesar Rp.195.528 ribu, yang terdiri dari beban penyusutan aset tetap dan inventaris sebesar Rp.181.301 ribu dan beban amortisasi aktiva tak berwujud sebesar Rp.14.227 ribu. Sebagai perbandingan beban penyusutan dan amortisasi tahun 2020 adalah sebesar Rp. 134.127 ribu sehingga naik sebesar Rp.61.401 ribu atau naik 45,78 persen.

7) Beban Overhead Kantor Lainnya

Beban overhead kantor lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp.1.116.901 ribu, yang terdiri dari komponen beban-beban operasional sebesar Rp.1.074.062 ribu dan beban-beban non-operasional sebesar Rp.42.839 ribu. Sedangkan beban overhead kantor lainnya 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp.1.158.035 ribu sehingga turun sebesar Rp.41.134 ribu atau turun 3,55 persen.

d. Laba (Rugi)

Pada tahun 2021 PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang mengalami kerugian sebesar Rp.4.588.210 ribu. Pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk terhadap kinerja keuangan, terutama pada aspek perkreditan. Dampak dari pandemi Covid-19 yang memaksa PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang mengambil kebijakan yang mempengaruhi kinerja keuangan sepanjang tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan beban PPAP kredit sebesar Rp.6.798.366 ribu yang dilakukan dalam rangka hapus buku kredit macet yang belum memiliki PPAP 100%.
2. Realisasi pendapatan bunga kredit menurun sebagai dampak dari pandemi Covid-19 seperti menurunnya usaha debitur (untuk kredit modal kerja dan Investasi) dan adanya kebijakan Pemerintah Kota palembang yang menurunkan besaran pembayaran serta penundaan pembayaran Tukin & TPP yang diterima ASN Pemerintah Kota Palembang (untuk kredit konsumtif).
3. Realisasi pendapatan dari pemulihan PPAP hanya sebesar Rp.419.921 ribu. Memburuknya kemampuan membayar debitur baik dari usaha maupun penghasilan sebagai dampak pandemi Covid-19 menjadi penyebab belum tercapainya target tersebut.

Secara kumulatif saldo laba (rugi) di neraca posisi 31 Desember 2021 tercatat rugi sebesar Rp.9.050.491 ribu. Saldo rugi tersebut terjadi karena adanya kerugian yang dialami pada tahun 2016 sebesar Rp.5.986.094 ribu sebagai akibat dari pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa pra-operasional sejak tahun 2009 hingga 31 Desember 2015 sebesar Rp.4.837.111 ribu yang harus dibebankan sekaligus pada tahun pertama operasional dan tidak boleh ditangguhkan.

Sebagai perbandingan pada tahun 2020 PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang membukukan laba sebesar Rp.569.050 ribu.

ribuan rupiah

Pendapatan Operasional	13.577.960
Beban Operasional	18.160.783
Laba (Rugi) Operasional	**(4.582.823)**
Pendapatan Non Operasional	37.451
Beban Non Operasional	42.839
Laba (Rugi) Non Operasional	**(5.388)**
LABA (RUGI) TAHUN 2021	**(4.588.210)**
AKUMULASI RUGI TAHUN SEBELUMNYA	**(4.462.281)**
SALDO LABA (RUGI)	**(9.050.491)**

2. Rasio-Rasio Keuangan

Ditinjau dari rasio-rasio keuangan, PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang mencatat rasio-rasio yang cukup sehat. Rasio KPMM sebesar 56,34% menunjukkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang memiliki permodalan yang kuat. Rasio KAP dan PPAP tercatat masing-masing sebesar 8,99% dan 100%. Sedangkan dari segi rentabilitas rasio Return on Aset (RoA) sebesar -5,23% dan BOPO sebesar 133,75%. Dari segi liquiditas, Cash Ratio tercatat sebesar 37,96% dan LDR sebesar 61,05%. Sedangkan NPL dan NPL net pada tahun 2021 masing-masing sebesar 18,28% dan 13,08%.

Rasio-Rasio Keuangan

RASIO KEUANGAN		2021	2020
PERMODALAN			
1	KPMM	56,34%	58,70%
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF			
1	RASIO KAP	8,99%	12,00%
2	RASIO PPAP	100,00%	100,00%
3	NPL	18,28%	18,70%
4	NPL Net	13,08%	11,65%
RENTABILITAS			
1	RETURN ON ASET (ROA)	-5,23%	0,61%
2	RASIO BOPO	133,75%	96,01%
LIKUIDITAS			
1	CASH RATIO	37,96%	20,61%
2	LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR)	61,05%	75,81%

3. Penanganan Kredit Bermasalah

Penanganan kredit bermasalah dimulai sejak awal pengajuan kredit, dengan melakukan analisa resiko yang akurat dan menentukan antisipasinya. Selanjutnya setelah dilakukan pencairan kredit, bagian kredit harus melakukan monitoring terhadap *account* yang dikelolanya sampai dengan kredit lunas. Untuk Kredit Bermasalah (col. 3, 4, dan 5) akan dilakukan penagihan secara aktif, dan intensif.

Untuk debitur-debitur yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran karena penurunan usaha, namun masih kooperatif dan memiliki itikad baik untuk membayar angsuran, maka akan dilakukan penyelamatan kredit. Bentuk dari penyelamatan kredit, dapat berupa :

- Penjadwalan kembali angsuran (*rescheduling*)
  Perubahan syarat kredit menyangkut jadwal pembayaran angsuran dan jangka waktu.
- Persyaratan kembali kredit (*recondition*)
  Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit, meliputi perubahan jadwal pembayaran angsuran, jangka waktu pembayaran atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum sisa kredit.
- Penataan kembali (*restructuring*)
  Yaitu perubahan syarat kredit menyangkut; Penambahan jumlah pokok kredit, atau sebagian atau seluruh tunggakan bunga dikonversi menjadi pokok kredit baru, dapat pula disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali. Dalam melaksanakan hal tersebut diatas akan dilakukan permohonan kredit oleh Debitur, dan dianalisa kembali kemampuan membayar, analisa usaha dan jangka waktu kredit.

Apabila upaya penyelamatan kredit bermasalah menemui jalan buntu dan Debitur sudah tidak lagi memiliki kemampuan membayar maka akan dilakukan penyelesaian kredit melalui pelelangan ataupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penurunan kualitas kredit Debitur secara umum disebabkan karena dampak pandemi Covid-19. Debitur umum (non ASN) yang masuk dalam kategori NPL disebabkan karena mengalami masalah penurunan usaha, sedangkan Debitur ASN yang masuk dalam kategori NPL disebabkan adanya keputusan Pemerintah Kota Palembang untuk melakukan penyesuaian pengeluaran daerah, yang berdampak pada penurunan serta penundaan pembayaran Tukin & TPP terhadap ASN Pemerintah Kota Palembang yang merupakan sumber pembayaran angsuran di PT BPR Palembang.

Pada posisi Desember 2021 jumlah kredit bermasalah adalah sebesar Rp.9.176.234 ribu dari total outstanding kredit sebesar Rp.50.198.558 ribu sehingga rasio Non Performance Loan (NPL) menjadi 18,28%. Apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2020 jumlah kredit bermasalah sebesar Rp.11.283.702 ribu dari total outstanding kredit sebesar Rp.60.332.303 ribu dan rasio NPL adalah sebesar 18,70%. Pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah kredit bermasalah sebesar Rp.2.107.468 ribu dengan penurunan rasio NPL sebesar 0,42%.

Sementara itu penurunan outstanding kredit pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 disebabkan oleh :

1. Kebijakan hapus buku kredit macet yang dilakukan pada tahun 2021 sebesar Rp.7.940.514 ribu. Atas kredit yang dihapus buku tersebut tetap dicatatkan pada pos administrative.
2. Penghentian sementara penyaluran kredit kepada ASN yang sumber pembayarannya dari penghasilan Tukin dan TPP sebagai akibat dari adanya keputusan Pemerintah Kota Palembang untuk melakukan penyesuaian pengeluaran daerah, yang berdampak pada penurunan serta penundaan pembayaran Tukin & TPP terhadap ASN Pemerintah Kota Palembang yang merupakan sumber pembayaran angsuran di PT BPR Palembang.

Adapun penyebab utama kredit bermasalah pada tahun 2021 berdasarkan jenis produk kredit adalah sebagai berikut :

1. Kredit kepada ASN (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.2.511.856 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.27.637.952 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 9,09%)
   a. Adanya penundaan dan penurunan pembayaran Tukin & TPP berkaitan dengan anggaran keuangan daerah dampak Covid-19.
   b. Beralihnya pemberlakuan TPP yang dasar pembayarannya adalah Perwali menjadi Tunjangan Kinerja (Tukin) yang dasar pembayarannya dari Kemendagri yang mengakibatkan sebagian Debitur mengalami penurunan penghasilan.
   c. Beberapa Debitur meminta kepada bendahara gaji untuk menunda pemotongan Tukinnya dengan alasan ada keperluan mendesak.
   d. Adanya rotasi dan mutasi debitur dan bendahara di lingkungan ASN Kota Palembang.
2. Kredit Sertifikasi Diknas (O/S kredit Rp.330.434 ribu dengan kualitas kredit lancar dan NPL per produk 0,00%)
   a. Belum ada kredit bermasalah untuk jenis produk kredit ini.
   b. Monitoring akan terus dilakukan secara ketat untuk menjaga kualitas kredit.

3. Kredit Pedagang/Umum/Kredit Modal Kerja (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.143.587 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.1.326.245 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 10,83%)
   a. Pandemi Covid-19 menyebabkan usaha debitur mengalami penurunan sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
   b. Kurangnya monitoring kepada debitur.
   c. Beberapa Debitur beritikad tidak baik dalam membayar kewajibannya.

4. Kredit Multi Guna (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.5.677.529 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.8.685.926 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 65,36%)
   a. Pandemi Covid-19 menyebabkan usaha debitur mengalami penurunan sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
   b. Debitur yang sumber pembayarannya bersumber dari tunjangan perjalanan dinas, mengalami penurunan penghasilan akibat dampak pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas. Disamping itu terjadi penurunan besaran perhitungan biaya perjalanan dinas dampak dari penyesuaian anggaran.
   c. Kurangnya monitoring kepada debitur.
   d. Untuk Kredit Multi Guna yang sumber pembayarannya dari pemotongan gaji bulanan, beberapa Debitur mengundurkan diri dan pindah bekerja sehingga tidak dapat dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran sedangkan asuransi jiwa dan PHK tidak mengcover pengunduran diri debitur.
   e. Beberapa Debitur beritikad tidak baik dalam membayar kewajibannya.

5. Kredit Program UKM (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.404.441 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.404.441 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 100,00%)
   a. Usaha debitur mengalami penurunan akibat terdampak pandemi covid-19 sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
   b. Beberapa Debitur pindah domisili dan usaha, sehingga Bank kesulitan untuk melakukan penagihan.
   c. Jumlah Debitur yang relatif besar membuat Bank kesulitan untuk melakukan monitoring.
   d. Beberapa Debitur beritikad tidak baik dalam membayar kewajibannya.

6. Kredit Investasi (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.26.708 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.3.261.710 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 0,82%)
   a. Monitoring dilakukan secara ketat dan beberapa Debitur telah dilakukan restrukturisasi bagi yang mengalami kesulitan membayar angsuran akibat penurunan usaha terdampak covid-19.
   b. Debitur cukup kooperatif dalam menginformasikan kondisi usaha yang menjadi sumber utama pengembalian angsuran.

7. Kredit Channeling Sertifikasi (O/S kredit Rp.3.137.647 ribu dengan kualitas kredit lancar dan NPL per produk 0,00%)
   a. Belum ada kredit bermasalah untuk jenis produk kredit ini.
   b. Monitoring akan terus dilakukan secara ketat untuk menjaga kualitas kredit.

8. Kredit KPR Umum (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.146.612 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.1.151.617 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 12,73%)
   a. Usaha debitur mengalami penurunan akibat terdampak pandemi covid-19 sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
   b. Debitur mengalami kesulitan membayar karena kondisi keuangan perusahaan tempat bekerja sedang menurun yang berimbas pada berkurangnya penghasilan debitur untuk membayar angsurannya.
   c. Kurangnya monitoring kepada debitur.

9. Kredit Usaha Kelompok Musi (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.248.750 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.4.245.833 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 5,86%)
   a. Usaha debitur mengalami penurunan akibat terdampak pandemi covid-19 sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
   b. Beberapa Debitur pindah domisili dan usaha, sehingga Bank kesulitan untuk melakukan penagihan.
   c. Jumlah Debitur yang relatif besar membuat Bank kesulitan untuk melakukan monitoring.
   d. Beberapa Debitur beritikad tidak baik dalam membayar kewajibannya.

10. Kredit Pasar Wong Kito (O/S kredit bermasalah sebesar Rp.16.750 ribu dari total O/S kredit sebesar Rp.16.750 ribu dengan NPL per produk kredit sebesar 100,00%)

a. Usaha debitur mengalami penurunan akibat terdampak pandemi covid-19 sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang.
b. Beberapa Debitur pindah domisili dan usaha, sehingga Bank kesulitan untuk melakukan penagihan.
c. Beberapa Debitur beritikad tidak baik dalam membayar kewajibannya.
d. Kurangnya monitoring kepada debitur.

Adapun Upaya perbaikan kualitas kredit untuk menekan NPL dilaksanakan dengan strategi-strategi antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyaluran kredit sertifikasi dengan pola channeling dengan BPR Baturaja dimana BPR Palembang sebagai pemilik dana dan BPR Baturaja sebagai agen.
2. Menawarkan top up bagi debitur kredit Honorer Pemerintah Kota Palembang namun tetap disesuaikan dengan SOP yang ada.
3. Terus menyalurkan kredit UKM kelompok Musi dengan penerapan prinsip kehati-hatian.
4. Diversifikasi produk kredit yaitu kredit sertifikasi guru Diknas dan Kemenag yang akan dikelola oleh tim kredit tersendiri.
5. Menawarkan top up bagi debitur kredit UKM Kelompok Musi yang tergolong lancar atau telah lunas dengan plafond kredit yang lebih besar, namun tetap sesuai dengan kemampuan membayarnya.
6. Memperkuat kerjasama dengan Instansi-Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perusahaan Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
7. Menerbitkan surat peringatan terhadap debitur yang telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
8. Melakukan perbaikan kualitas kredit dengan upaya penagihan dan percepatan restrukturisasi kredit bagi debitur yang masih memiliki sumber pembayaran angsuran.
9. Melakukan *legal action* atas debitur yang tidak prospek dan tidak kooperatif, seperti :
   - Eksekusi Agunan dengan Parate Eksekusi APHT & Fidusia terdaftar. Gugat Sita Agunan untuk pengosongan apabila eksekusi agunan tidak berhasil.
   - Lelang HT & Fidusia melalui KPKLN guna penyelesaian kredit dgn agunan.
   - Gugatan Sederhana melalui PN untuk debitur yang tidak kooperatif.
   - Proses Pidana untuk debitur-debitur yang terbukti tidak kooperatif dan mempunyai pelanggaran pidana.
   - Kepailitan melalui Pengadilan Niaga untuk debitur tidak kooperatif.
   - AYDA utk penyelesaian kredit melalui penyerahan agunan.

Bagian Ketiga

Laporan Pengelolaan **Perusahaan**

1. Aktivitas Utama

Anggaran Dasar Perseroan menandaskan, bahwa maksud dan tujuan didirikannya Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang Bank Perkreditan Rakyat dengan aktivitas kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain, serta menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Penghimpunan Dana

Struktur pendanaan ditunjang dari sumber-sumber dana masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka. Untuk mengisi kekurangan/gap antara portofolio pinjaman dengan dana masyarakat yang mampu dimobilisasi, digunakan dana antarbank passiva atau simpanan dari bank lain dalam bentuk deposito berjangka.

1). Tabungan

Total dana yang berhasil dihimpun melalui produk tabungan pada tahun 2021 mencapai Rp.6.816.377 ribu. Saat ini PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang memiliki 2 (dua) produk tabungan yaitu Tabungan Pasar Perdana-Perorangan sebesar Rp.5.294.613 ribu, dan Tabungan Pasar Perdana-Non Perorangan sebesar Rp.1.521.764 ribu.

Struktur Pendanaan Tahun 2021

dalam ribuan Rupiah

No	PENDANAAN	SALDO 2021	%
1	Tabungan	Rp. 6.816.377	12,01
2	Deposito Berjangka	Rp. 35.051.004	61,74
3	Antar Bank Passiva	Rp. 14.900.000	26,25
	Total	**Rp. 56.767.380**	**100,00**

2). Deposito Berjangka

Saldo deposito berjangka posisi tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.35.051.004 ribu dengan rincian saldo deposito berjangka 1 (satu) bulan sebesar Rp. 9.257.381 ribu, deposito berjangka 3 (tiga) bulan sebesar Rp.5.269.411 ribu, deposito berjangka 6 (enam) bulan sebesar Rp.10.963.689 ribu, dan saldo deposito berjangka 12 bulan sebesar Rp.9.560.523 ribu.

3). Antarbank Passiva

Posisi 31 Desember 2021 pendanaan dari penempatan antar bank passiva yang berhasil dihimpun sebesar Rp.14.900.000 ribu, yang terdiri dari simpanan dari bank lain 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, dan 6 (enam) bulan masing-masing sebesar Rp.1.000.000 ribu, Rp.1.000.000 ribu dan Rp.12.900.000 ribu.

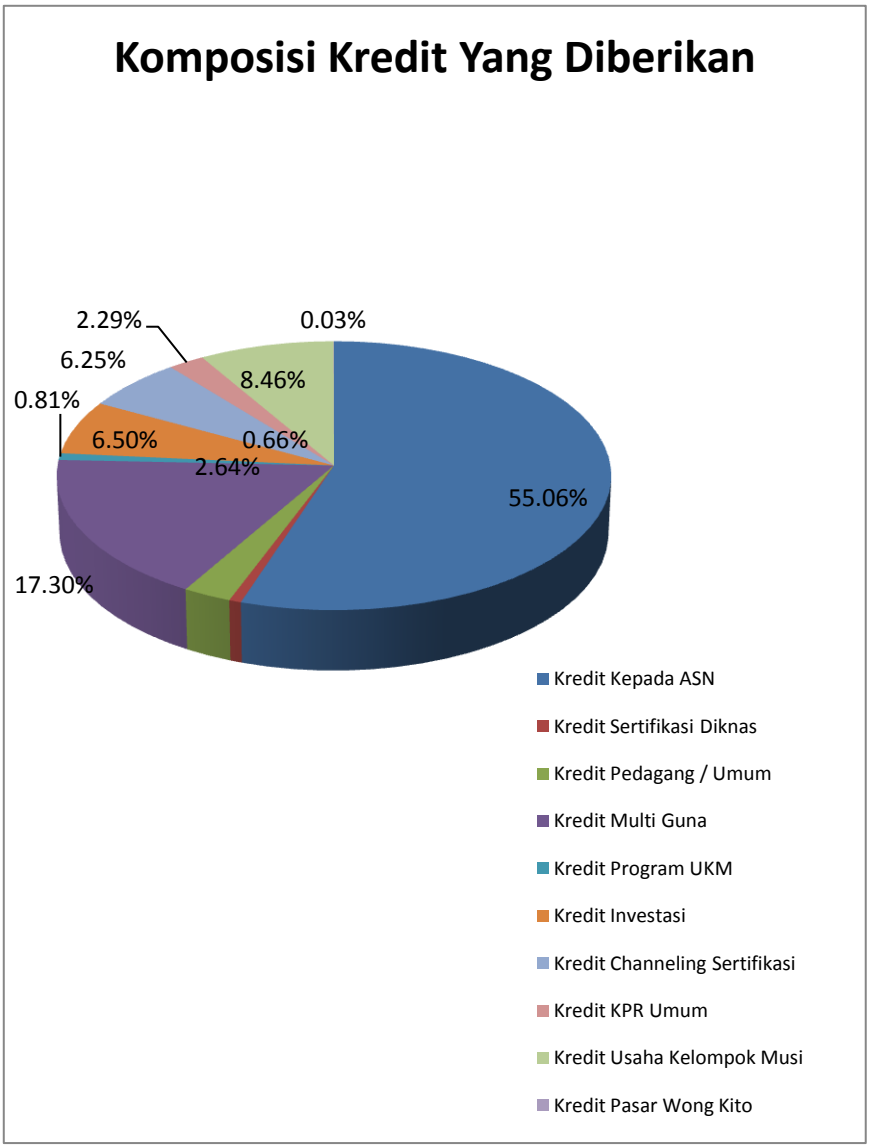
b. Penyaluran Dana

Saldo outstanding kredit pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp.50.198.558 ribu. Adapun produk kredit / pinjaman yang diberikan terdiri dari 10 jenis kredit yaitu :

dalam ribuan Rupiah

NO	JENIS KREDIT	BAKI DEBET	%
1	Kredit Kepada ASN	27,637,952,142	55.06
2	Kredit Sertifikasi Diknas	330,434,598	0.66
3	Kredit Pedagang / Umum	1,326,245,406	2.64
4	Kredit Multi Guna	8,685,925,833	17.30
5	Kredit Program UKM	404,441,009	0.81
6	Kredit Investasi	3,261,710,509	6.50
7	Kredit Channeling Sertifikasi	3,137,647,585	6.25
8	Kredit KPR Umum	1,151,617,476	2.29
9	Kredit Usaha Kelompok Musi	4,245,833,323	8.46
10	Kredit Pasar Wong Kito	16,749,998	0.03
	TOTAL	**50,198,557,879**	**100.00**

Komposisi Kredit Yang Diberikan Tahun 2021



Bagian Keempat

Kebijakan dan Strategi **Perusahaan**

1. Kebijakan-kebijakan Perusahaan

Sepanjang tahun 2021, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang merealisasikan beberapa kebijakan dan strategi pengembangan perusahaan, baik yang terkait dengan perubahan kelembagaan, pengembangan daya dukung operasional, peningkatan kualitas SDM dan insfrastruktur serta pengembangan jaringan pemasaran. PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang juga secara konsisten mengimplementasikan prinsip pengendalian risiko/manajemen resiko, *Good Corporate Governance* (GCG), dan senantiasa menjalin kemitraan secara eksternal, baik terhadap lembaga keuangan sejenis, maupun masyarakat sekitar melalui penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

a. Penguatan Institusi Internal

Secara internal, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang selalu melakukan upaya konkrit pengembangan kelembagaan melalui restrukturisasi organisasi dan penguatan visi dan misi perusahaan. Penyusunan visi, misi dan filosofi perusahaan melibatkan seluruh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris. Sementara untuk pengembangan struktur organisasi, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah melakukan beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

b. Kebijakan Pemberian Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Termasuk Bonus, Tantiem, dan Fasilitas Lain

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain hingga 31 Desember 2021 belum ada perubahan dan masih berpedoman pada hasil keputusan RUPS tanggal 14 Mei 2018 yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 08 tanggal 14 Mei 2018.

c. Pengembangan Jaringan Pemasaran

Salah satu kebijakan pengembangan jaringan pemasaran yaitu dengan melakukan sosialisasi produk-produk PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang secara kontinu ke instansi-instansi di bawah Pemerintah Kota Palembang dan melakukan kerja sama dengan Kepala-kepala SKPD dan bendaharawan/ti pemotong gaji di lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk dapat membantu Bank dalam melakukan analisis awal sekaligus memberikan rekomendasi terhadap calon-calon debitur potensial untuk kemudian ditinjaklanjuti oleh Account Officer. Adapun pengembangan jaringan pemasaran lainnya yang dilakukan adalah masuk ke pasar usaha mikro dan kecil dengan memasarkan produk "Kredit Usaha Kelompok Musi" dengan sasaran pedagang kecil dan usaha jasa di masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi laba bagi BPR Palembang sekaligus membantu percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya sektor Usaha Kecil dan Mikro (UKM) di Kota Palembang.

d. Peningkatan Kualitas SDM

Jumlah karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang pada posisi Desember 2021 berjumlah 44 orang, berkurang jika dibandingkan dengan jumlah karyawan pada posisi 31 Desember 2020 yang berjumlah 47 orang. Adapun klasifikasi jenjang pendidikan karyawan adalah sebagai berikut :

Klasifikasi Jenjang Pendidikan Karyawan Tahun 2021

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	3
2	D 3	6
3	S 1	35
	Jumlah	**44**

Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi SDM, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang berpartisipasi pada beberapa program pendidikan dan pelatihan SDM, baik yang diselenggarakan secara internal maupun program pendidikan dan pelatihan SDM yang diselenggarakan oleh pihak eksternal dan asosiasi. Pelatihan dan Pendidikan SDM lebih banyak dilakukan secara daring mengingat pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Audit Intern Level 1-4 Angakatan IV yang diselenggarakan oleh Yayasan Perbarindo Jawa Barat pada tanggal 22 & 23 Januari 2021.
2. FGD Digitalisasi Proses Bisnis dan Transformasi BPR Milik Pemda dengan Direktur B3 Kementrian Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh PERBAMIDA pada tanggal 18 & 19 Januari 2021.
3. Pelatihan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 35, 36 Tahun 2021 yang diseslenggarakan oleh CV Meta Dinamika pada tanggal 10 Maret 2021.
4. Aplikasi Online BPR-KPI (Key Performance Indikator) yang diselenggarakan oleh Yayasan Perbarindo Jawa Barat & Creya Business Consulting pada tanggal 07 April 2021.
5. Pelatihan Penyegaran dan Survailen Sertifikasi Ulang Direksi & Komisaris BPR dengan Metode Jarak Jauh (Vidio Conference) yang diselenggarakan oleh DPD Perbarindo Sumatera Barat pada tanggal 19 April s/d 27 April 2021.
6. Trainning Online Belajar Praktis Pendalaman Hukum Perbankan yang diselenggarakan DPD Perbarindo Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2021.
7. Workshop Integrasi CBS milik Pemerintah Daerah dengan SIPD, di Jakarta yang diselenggarakan oleh Perbamida pada tanggal 24-25 Sepember 2021.
8. Surveilan Komisaris yang diselenggarakan oleh DPD Perbarindo pada tanggal 27 September - 2 Oktober 2021.
9. Penerapan Layanan Pengaduan Konsumen yang diselenggarakan oleh Yayasan Perbarindo Sejahtera pada tanggal 07 Oktober 2021.
10. Workshop Integrasi CBS milik Pemerintah Daerah dengan Kementrian dalam Negeri, di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Perbamida pada tanggal 18 Oktober 2021.
11. Partisipasi dalam Kegiatan Program Inklusi Literasi dan Edukasi sektor Jasa Keuangan, di Pangkal Pinang-Babel yang diselenggarakan oleh Perbarindo Sumsel Babel pada tanggal 22 Oktober 2021.
12. Penyegaran dan Survailen Sertifikasi Ulang Direksi BPR yang diselenggarakan oleh DPD Perbarindo Sumatera Barat pada tanggal 10-18 November 2021.
13. Pelatihan RBB Tahun 2022 di Padang yang diselenggarakan oleh PT Fokus Solusi Utama pada tanggal 20-21 November 2021.
14. Study Banding ke Padang (BPRS Jam Gadang Bukit Tinggi) pada tanggal 22-24 November 2021.
15. AYDA BPR Pasca Putusan Mahamah Konstitusi, Bebas Risiko Cacat Dokumen yang diselenggarakan oleh Intersa pada tanggal 03 Desember 2021.
16. Seminar dan Munas Perbamida ke IX di Surabaya yang diselenggarakan oleh Perbamida pada tanggal 02-04 Desember 2021.

e. Peningkatan Daya Dukung Fasilitas dan Teknologi Informasi

1. Sistem Operasional Teknologi Informasi

Kebijakan ini antara lain direalisasikan dalam bentuk penyempurnaan sistem aplikasi perbankan (*core banking system*) milik Telkom Sigma untuk meningkatkan pelayanan pada nasabah dan keamanan data serta menyesuaikan dengan regulasi yang terus berkembang. Namun demikian, untuk meningkatkan kecepatan penyediaan data dan informasi yang diperlukan, pada tanggal 08 Oktober 2021 dilakukan penggantian pada *core banking system* (CBS) dari Telkom Sigma ke *Banking Integrated System* (BIS). Pemanfaatan CBS BIS diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dalam persaingan yang semakin ketat. Vendor CBS BIS yaitu PT Fokus Solusi Utama berkomitmen melakukan *upgrade* sistem secara kontinu mengikuti perubahan ketentuan regulator dan kebutuhan perkembangan bisnis BPR.

2. Sistem Keamanan dan Penyedia Teknologi Informasi

Sistem keamanan teknologi informasi sudah dituangkan dalam SOP Teknologi Informasi. Saat ini *server system* dan *data center* dikelola secara mandiri oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Sementara *back up* data selain berada di internal bank juga dilakukan *back up* oleh vendor CBS PT Fokus Solusi Utama. Selain itu juga dilakukan kerja sama dengan Bank Umum diantaranya *cash management system* dan *virtual account* yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Nasabah dan/atau Debitur dan untuk mempermudah pembayaran angsuran kredit debitur.

Penyedia Teknologi Informasi

Core Banking System	:	Banking Integrated System – PT Fokus Solusi Utama
Cash Management System	:	Bank Permata Syariah, Bank Sumsel Babel, Bank Jawa Barat & Banten, Bank Mandiri, Bank Maspion, Bank J-Trust Indonesi
Virtual Account	:	Bank Permata Syariah, Bank Maspion

f. Penguatan Jaringan dan Kerjasama Eksternal

1. Perkembangan dan Target Pasar

Pada tahun 2021 PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah menyalurkan kredit kepada 767 debitur ASN dengan total penyaluran kredit sebesar Rp.27.242.201 ribu dan outstanding kredit sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp.31.106.034 ribu. Penyaluran kredit kepada ASN masih menjadi *core business* utama dalam portofolio aktiva produktif BPR.

dalam ribuan rupiah

NO	JENIS KREDIT	BAKI DEBET	%
1	Kredit Kepada ASN	27,637,952,142	55.06
2	Kredit Sertifikasi Diknas	330,434,598	0.66
3	Kredit Pedagang / Umum	1,326,245,406	2.64
4	Kredit Multi Guna	8,685,925,833	17.30
5	Kredit Program UKM	404,441,009	0.81
6	Kredit Investasi	3,261,710,509	6.50
7	Kredit Channeling Sertifikasi	3,137,647,585	6.25
8	Kredit KPR Umum	1,151,617,476	2.29
9	Kredit Usaha Kelompok Musi	4,245,833,323	8.46
10	Kredit Pasar Wong Kito	16,749,998	0.03
TOTAL		**50,198,557,879**	**100.00**

Sementara itu, penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih tetap dilanjutkan. Namun dengan skema yang berbeda dari tahun lalu. Pada tahun-tahun sebelumnya, penyaluran kredit UMKM atau disebut kredit Program UKM dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang. PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang sebagai bank penyalur kredit program UKM sesuai Perwali dan Surat Penunjukan dari Pemerintah Kota Palembang. Dalam kerja sama tersebut, bunga dan biaya-biaya akad kredit tidak dibebankan ke debitur UKM namun disubsidi oleh Pemerintah Kota Palembang. Pada tahun 2021, penyaluran kredit kepada pelaku UKM dilakukan secara mandiri oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Kredit ini disebut Kredit Usaha Kelompok Musi, dengan skema kredit penambahan modal kerja, jangka waktu 1 (satu) tahun, serta suku bunga dan biaya-biaya akad kredit dibebankan kepada debitur. Penyaluran kredit ini ditujukan untuk melawan rentenir dan membantu akses permodalan sektor UMKM sehingga dapat menumbuhkan iklim usaha UMKM di Kota Palembang. Selain itu, dari penyaluran kredit ini diharapkan mampu membantu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sedang digalakkan Pemerintah dampak dari pandemi Covid-19.

2. Jaringan Kerja dan Mitra Usaha

Jaringan kerja yang dibangun di tahun 2021 yaitu melakukan perjanjian kerja sama dengan dinas-dinas dan kecamatan-kecamatan di Kota Palembang. PT. Bank Perkreditan Rakyat Palembang juga menjalin kemitraan dengan BUMD-BUMD Kota Palembang, antara lain PD Pasar, PT SP2J, PT PLPJ, dan lain-lain. Kerjasama ditujukan untuk memperkuat posisi

PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dalam penyaluran kredit kepada ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Kota Palembang yang merupakan *captive market* bagi PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang. Upaya untuk terus terlibat secara aktif pada berbagai kegiatan organisasional asosiatif guna pengembangan perusahaan akan terus dilakukan antara lain kegiatan yang terkait dengan program kerja Perbamida dan Perbarindo Sumatera Bagian Selatan. Selain itu upaya meningkatkan kerja sama dengan mitra bisnis seperti Bank Umum dan BPR lainnya juga akan terus dipererat dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Nasabah dan peningkatan teknologi informasi BPR. Kerja sama penyaluran kredit dalam bentuk *linkage program* (kredit channeling) telah dilakukan pada tahun 2021 melalui Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja. Total Plafon penyaluran kredit channeling selama tahun 2021 sebesar Rp.3.171.201 ribu untuk 51 Debitur. Sampai dengan akhir 2021 outstanding kredit channeling sebesar Rp.3.137.648 ribu.

2. Implementasi Manajemen Resiko

PT.Bank Perkreditan Rakyat Palembang dalam operasionalnya senantiasa menerapkan prinsip *prudential banking*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari segala resiko yang dapat terjadi yang berpotensi merugikan bank. Identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan melalui beberapa aspek resiko sebagai berikut :

a. Resiko Kredit

Antara lain dengan menerapkan beberapa strategi seperti : analisis cermat realisasi aplikasi kredit, penggunaan pusat data Informasi Debitur dari aplikasi SLIK, melakukan pegikatan jaminan secara notarial, penutupan asuransi jiwa, PHK, kemacetan dan kerugian yang disesuaikan dengan jenis dan plafon kredit serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian kredit bermasalah.

b. Risiko Likuiditas

Menerapkan sistem kendali kebutuhan likuiditas perusahaan secara harian, baik untuk pelayanan kredit maupun simpanan.

c. Risiko Operasional

Antara lain dengan menerapkan beberapa kebijakan pengendalian/ pembatasan transaksi secara berjenjang, peningkatan pengawasan internal secara efektif dan optimal.

d. Risiko Kepatuhan

Antara lain dengan membuat / merancang kebijakan dan standar prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan seluruh unsur dalam perusahaan mentaati dan menjalankan semua peraturan yang berlaku dengan penuh tangggung jawab dan berkomitmen tinggi.

3. Prinsip Tata kelola Perusahaan yang Baik

PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang secara konsisten menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan senantiasa mengedepankan aspek dan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibility, indepedensi, dan fairness (kesetaraan dan kewajaran). Nilai-nilai tata kelola sebagaimana dimaksud dengan TARIF, telah diimplementasikan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi seperti :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang didalamnya mencakup tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 30/SK-Dir/BPR-PASAR/IX/2017 yang diberlakukan sejak tanggal 26 September 2017. Kemudian diubah dengan Keputusan Direksi No. 003/SK-Dir/BPR-PLG/II/2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang, yang diberlakukan sejak tanggal 23 Februari 2021.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang didalamnya mencakup tugas, wewenang dan tanggungjawab. Dewan komisaris dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BPR/XI/2017 yang diberlakukan sejak tanggal 27 November 2017. Kemudian diubah dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 002/DEKOM-BPR/II/2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang, yang diberlakukan sejak tanggal 23 Februari 2021.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah memiliki kelengkapan tugas dan fungsi komite antara lain Komite Kredit, Komite SDM, dan Aset Liability Committee (ALCO).

4. Penanganan benturan kepentingan

   Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pada tanggal 31 Oktober 2019 telah diberlakukan Standar Prosedur dan Operasi tentang Benturan Kepentingan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 18/SK-Dir/BPR-PLG/X/2019.

5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah membentuk Fungsi Kepatuhan sejak tanggal 20 Maret 2017 dengan menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan telah membuat kebijakan dan prosedur tentang fungsi kepatuhan pada tanggal 05 Februari 2018.

Demikian halnya dengan fungsi audit intern, telah diangkat Pejabat Eksekutif Audit Intern sejak tanggal 29 Agustus 2016 dan telah memiliki kebijakan tentang audit intern pada tanggal 15 April 2017.

6. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

   BPR telah melaksanakan penerapan manajemen risiko dengan menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang membawahkan fungsi manajemen risiko sejak tanggal 04 Februari 2019 sesuai keputusan Direksi Nomor: 007/ BPR-BP/KEP/II/2019. Untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko melakukan Telaah Risiko pada Proses Kredit dan Kebijakan Prosedur yang ada di PT. BPR Palembang. Adapun Kebijakan dan Prosedur terhadap Fungsi Manajemen Risiko telah dibuat dan mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 03 Juli 2018.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

   Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah mengatur dan memiliki kebijakan serta prosedur tentang BMPK sesuai Keputusan Direksi Nomor 026/SK-Dir/BPR-PASAR/VII/2017 yang telah diberlakukan sejak tanggal 01 Agustus 2017. Selama tahun 2021 tidak ada penyaluran kredit yang melanggar atau melampaui BMPK.

8. Rencana Bisnis BPR

   PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah melaksanakan dan membuat laporan mengenai rencana bisnis BPR dan mulai dilaporkan pertama kali tahun 2018. Rencana bisnis tahun 2022 telah dilaporkan secara online ke OJK pada tanggal 21 Desember 2021.

9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

   Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR yaitu laporan publikasi yang di tampilkan pada *website* BPR : www.bankbprpalembang.com dan di publikasi pada salah satu media cetak di Kota Palembang.

4. Perubahan Penting Lain yang Terjadi di BPR dan/atau di Kelompok Usaha BPR yang Mempengaruhi Operasional BPR

Pada tahun 2021 terjadi beberapa perubahan penting yang mempengaruhi operasional PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang, antara lain :

- Dalam Akta Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH No. 01 tanggal 06 Januari 2021 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa PT BPR Palembang, RUPS Luar Biasa memutuskan terkait masa jabatan Pengurus untuk memberhentikan dan mengangkat kembali Pengurus yang habis masa jabatannya (perpanjangan masa jabatan).
- Sebagai BPR Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas (berdasarkan Permendagri No. 22 Tahun 2006 dan Perda No 1 Tahun 2016), PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang sedang dalam proses penyesuaian kelembagaan menjadi BUMD PT Bank Perkreditan

Rakyat Palembang (Perseroda). Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan Permendagri No. 94 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017.

- Dampak dari pandemi Covid-19 masih terasa sepanjang tahun 2021. Penurunan kualitas kredit secara umum disebabkan karena adanya dampak dari pandemi Covid-19, seperti usaha debitur mengalami penurunan sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menjadi berkurang. Sedangkan untuk Debitur ASN mengalami kesulitan membayar angsuran karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Palembang untuk melakukan penyesuaian pengeluaran daerah, yang berdampak pada penurunan serta penundaan pembayaran Tukin & TPP bagi ASN Pemerintah Kota Palembang yang merupakan sumber pembayaran angsuran di PT BPR Palembang.

5. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap masyarakat di lingkungan kantor dan wilayah Kota Palembang, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang secara berkala mengadakan kegiatan syukuran yang dihadiri seluruh Pengurus, Karyawan, dan Pemegang Saham dengan mengundang beberapa panti asuhan dan pengurus Rukun Tetangga di lingkungan kantor PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang yang disertai dengan pembagian bingkisan sembako dan bantuan dana.

Bagian Kelima

Laporan Keuangan

salinan pernyataan KAP

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia
No.378/KM.1/2019

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00025/2.1269/AU.2/07/1394-2/1/IV/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT BPR Palembang

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Palembang yang terlampir, terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit wajar dengan pengecualian kami.

Alamat Kantor : Perumahan Mega Asri No. B3,
Jl. Garuda, Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. 55581
Telp. 0274 - 7371714
Email : Sandrapracipta@gmail.com
www.kapsandrapracipta.com

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia
No.378/KM.1/2019

Basis untuk opini wajar dengan pengecualian

Sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas keuangan No. 2.p, 3.13 bahwa PT BPR Palembang atas laporan keuangan pada tahun 2021, Perusahaan tidak mencadangkan kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2015) mengenai "Imbalan Kerja" dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang "Imbalan Kerja" serta Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 agar penerapannya sesuai dengan prinsip akuntansi di indonesia. Dampak atas tidak dibentuknya kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat ditentukan.

Opini

Menurut opini kami, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam hal semua yang material, neraca PT BPR Palembang tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan PT BPR Palembang pada 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan tersebut secara keseluruhan. Informasi didalam neraca dan laba rugi yang disertakan pada laporan terlampir untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang seharusnya menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Informasi didalam lampiran-lampiran merupakan tanggung jawab manajemen PT BPR Palembang yang dihasilkan dari catatan atas laporan keuangan.

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA





Sandra Pracipta, S.E., Ak., CA., CPA., *Asean* CPA.
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1394
Yogyakarta, 22 April 2022

Alamat Kantor : Perumahan Mega Asri No. B3,
Jl. Garuda, Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. 55581
Telp. 0274 - 7371714
Email : Sandrapracipta@gmail.com
www.kapsandrapracipta.com

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA

Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia
No.378/KM.1/2019

SURAT UNTUK MANAJEMEN

No. ML25/KAPSP/IV/22/2022

Kepada,
PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang (Perseroda)
Jl. R. Sukamto No. 2 C-D, Rt.042 Rw. 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang 30114, Sumatera Selatan, Indonesia.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kami mempertimbangkan struktur pengendalian intern perusahaan untuk menentukan prosedur audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak untuk memberikan keyakinan atas struktur pengendalian intern. Namun, kami temukan permasalahan tertentu yang menyangkut struktur pengendalian intern dan pelaksanaannya yang kami pandang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan menurut standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kondisi yang dapat dilaporkan mencakup permasalahan yang kami temukan, yang menyangkut kekurangan material dalam rancangan atau pelaksanaan struktur pengendalian intern, yang menurut pendapat kami, dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Laporan ini dimaksudkan hanya untuk memberikan informasi dan untuk digunakan oleh dewan komisaris, manajemen dan pihak lain dalam organisasi.

Hormat kami,
KAP SANDRA PRACIPTA, CPA

KAP SANDRA PRACIPTA, CPA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT

Sandra Pracipta, S.E., Ak., CA., CPA., *Asean*CPA.
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1394
Yogyakarta, 22 April 2022

Alamat Kantor : Perumahan Mega Asri No. B3,
Jl. Garuda, Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. 55581
Telp. 0274 - 7371714
Email : Sandrapracipta@gmail.com
www.kapsandrapracipta.com

Adapun permasalahan yang kami temukan dari hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

   Imbalan Kerja

   Permasalahan

   Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 BPR belum melakukan pencatatan kewajiban imbalan kerja jangka panjang akan tetapi untuk pengakuan terkait Cadangan yang seharusnya dibentuk belum dialkukan secara keseluruhan dan dilakukan secara bertahap terkait perhitungan untuk estimasi kewajiban imbalan Paska kerja.

   Dasar Ketentuan

   a. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 Tentang Imbalan Kerja.
   b. Pedoman Akuntasi Bank Perkreditan Rakyat BAB 5 No. 9 tentang Kewajiban Imbalan Kerja.
   c. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.
   d. Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

   Rekomendasi

   Kami menyarankan agar kedepannya untuk mematuhi ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik BAB 23 tentang Imbalan Kerja serta peraturan perundang-undangan berlaku.

   Tanggapan Manajemen:

   Kedepan akan dilakukan perhitungan oleh aktuaris sesuai ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan peraturan perundang-undangan berlaku.

2. **Kondisi**

   Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap AYDA dan implementasinya ada beberapa AYDA yang menurut ketentuan dalam POJK Nomor 33 Tahun 2018 wajib BPR wajib menilai AYDA pada saat pengambilalihan agunan untuk menetapkan nilai realisasi bersih:

a. untuk AYDA dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan oleh penilai intern BPR; dan

b. untuk AYDA dengan nilai lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) wajib dilakukan oleh penilai independen.

Serta BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan serta BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR, dengan ketentuan :

a. dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; dan

b. dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan., dengan rincian Sebagai berikut:

NO	NOREK	NAMA	TGL AWL	UMR	TGLJT	NILAI 31 DESEMBER 2021	KET
1	2000600000001	RUKIYAH	28/12/17	12	28/12/18	1.900.000.000	-
2	2000600000002	RUSTIMALA	30/01/20	12	30/01/21	129.700.000	Sudah terjual sebagian
3	2000600000003	HAYATUDIN	01/07/21	12	01/07/22	896.957.470	-
4	2000600000004	HAYATUDIN	01/07/21	12	01/07/22	356.485.177	-

Kriteria:

a. POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakya
b. Standar Prosedur dan Operasional Perkreditan.

Akibat:

Hal tersebut belum bisa menyajikan nilai wajar dari asset yang diambil alih oleh BPR.

Rekomendasi:

Kami merekomendasikan agar segera menyelesaikan AYDA yang ada dan atau segera menilai kembali secara berkala sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Tanggapan Manjaenem:

Akan segera menyelesaikan AYDA yang ada dan menilai kembali secara berkala sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

3. Tindak Lanjut Temuan SPI

Kondisi

Pasal 30 Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Kriteria

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/Pojk.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Rekomendasi

Disarankan agar Direksi dan Komisaris lebih memaksimalkan temuan-temuan Audit Internal dan menindaklanjuti dari temuan tersebut sehingga tujuan dibentuknya Audit Internal bisa membantu manajemen dalam merencanankan dan menyelelesaikan terkait kredit-kredit bermasalah yang ada pada perusahaan.

Tanggapan Managenent *:*

Direksi dan dewan komisaris telah berkomitmen kedepan akan memaksimal kan temuan temuan audit internal dan menindaklanjuti temuan audit agar terlaksana tata kelola yang lebih baik daripada sebelumnya dan temuan audit pada tahun 2021 telah selesai ditindaklanjuti.

4. Tindak Lanjut Penyelesaiann Kredit Bermasalah

Kondisi

Pada pemeriksaan kami atas laporan keuanagn PT BPR Palembang tahun buku 2021 untuk penyelesaiain kredit-kredit bermasalah belum maksimal oleh Manajemen.

Rekomendasi

Disarankan agar Direksi dan Komisaris lebih memaksimalkan temuan-temuan Audit Internal dan menindaklanjuti dari temuan tersebut sehingga tujuan dibentuknya Audit Internal bisa membantu manajemen dalam merencanankan dan menyelelesaikan terkait kredit-kredit bermasalah yang ada pada perusahaan.

Tanggapan Managenent :

Setuju dengan Auditor, temuan-temuan auditor intern dan Auditor ekstern (OJK) telah ditindaklanjuti pada tahun 2021. Adapun penyelesaian kredit bermasalah sebagian, telah berhasil diselesaikan dan sebagian lagi masih dalam proses penyelesaian.

5. Kondisi

a. Kelemahan pada pemberian kredit modal kerja
b. Kelemahan pada pemberian kredit rekening Koran
c. Kelemahan pada pemberian kredit UMKM merupakan program Pemkot.
d. Kelemahan pada pemberian kredit DPRD

Kriteria

Pedoman Standar Kebijakan Perkreeditan Bank Perkreditan Rakyat

Rekomendasi

Disarankan PT BPR Palembang menerapkan prinsif kehati-hatian sesuai dengan Pedoman Standar Kebijakan Perkreeditan Bank Perkreditan Rakyat.

Tanggapan Managenent *:*

Pemberian kredit akan selalu berpedoman dengan SOP Perkreditan dan Pedoman Standar Kebijakan Perkreeditan Bank Perkreditan Rakyat serta mengedepankan prinsip kehati-hatian.

NERACA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
Per 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
ASET			
Kas	2.c,3.1	665,671,400	846,193,900
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	2.d,3.2	1,044,144,562	808,637,411
Penempatan pada Bank Lain	2.e,3.3	34,154,157,946	25,223,619,166
PPAP Penempatan Pada Bank Lain	2.g,3.3	-	-
Total		34,154,157,946	25,223,619,166
Kredit yang Diberikan	2.f,3.4	50,198,557,879	60,332,303,151
Provisi & Adm.	2.f,3.4	(245,989,241)	(378,256,455)
Restrukturisasi Kredit		(61,397,291)	(128,465,443)
PPAP Kredit Yang Diberikan	2.g,3.4	(2,715,209,204)	(4,277,279,310)
Total		47,175,962,143	55,548,301,943
Agunan Yang Diambil Alih	2.h,3.5	3,283,142,647	2,720,000,000
Aset Tetap dan Inventaris	2.i,3.6	1,423,141,090	1,312,431,590
Akum. Peny. Aset Tetap & Inventaris	2.i,3.6	(1,151,203,406)	(969,902,511)
Total		271,937,684	342,529,079
Aset Tidak Berwujud	2.j,3.7	104,505,000	19,505,000
Akum. Peny. Aset Tidak Berwujud	2.j,3.7	(28,004,999)	(16,613,304)
Total		76,500,001	2,891,696
Aset lain-lain	2.k,3.8	432,446,079	684,198,570
JUMLAH ASSET		**87,103,962,463**	**86,176,371,765**

NERACA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
Per 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	2.l,3.9	1,217,293,962	1,151,893,276
Utang Bunga	2.m,3.10	165,965,933	220,100,867
Simpanan	2.n,3.11		
Tabungan		6,816,376,713	6,481,878,662
Deposito Berjangka		35,051,003,598	29,369,104,691
Simpanan dari Bank Lain	2.o,3.12	14,900,000,000	15,400,000,000
Kewajiban Imbalan Kerja	2.p,3.13	3,812,838	3,544,140
Kewajiban Lain-lain	2.q,3.14	-	12,130,688
Jumlah Kewajiban		**58,154,453,044**	**52,638,652,324**
EKUITAS	2.r,3.15		
Modal			
Modal Dasar		100,000,000,000	100,000,000,000
Modal Belum Disetor		(62,000,000,000)	(62,000,000,000)
Modal Disetor		**38,000,000,000**	**38,000,000,000**
Saldo laba	2.s,3.15		
Cadangan Umum		-	-
Cadangan Tujuan		-	-
Laba Yang Belum Ditentukan Tujuannya:			
Laba (Rugi) Tahun Lalu		(4,462,280,559)	(5,031,330,855)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		(4,588,210,021)	569,050,296
Jumlah Saldo laba		**(9,050,490,580)**	**(4,462,280,559)**
Jumlah Ekuitas		**28,949,509,420**	**33,537,719,441**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**87,103,962,463**	**86,176,371,765**

Palembang, 22 April 2022

Penyusun	Direview	Disetujui	
M Irfan Ghifari	Eko Karnain	Slamet	Syafril
Staf Akuntansi	Manager Operasional	Direktur	Direktur Utama

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN LABA RUGI
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	2.t,3.16		
Bunga Kontraktual		12,096,649,692	13,306,856,470
Provisi Dan Jasa Administrasi		744,974,604	882,276,896
Beban Transaksi		(227,029,975)	(335,131,782)
Jumlah Pendapatan Bunga		**12,614,594,321**	**13,854,001,584**
Beban Bunga	2.u,3.18	(3,716,866,596)	(4,767,660,938)
Pendapatan Operasional Lainnya	2.t,3.17	963,366,419	791,489,589
Jumlah Pendapatan Operasional		**9,861,094,145**	**9,877,830,236**
Beban Operasional	2.u		
Beban Penyisihan Kerugian	3.19	6,798,365,816	1,676,045,916
Beban Pemasaran	3.20	81,647,000	100,581,208
Beban Administrasi dan Umum	3.21	7,415,941,961	7,407,885,351
Beban Operasional Lainnya	2.22	147,961,491	108,961,515
Jumlah Beban Operasional		**14,443,916,268**	**9,293,473,990**
Laba (Rugi) Operasional		**(4,582,822,124)**	**584,356,246**
Pendapatan (Beban) Non Operasional			
Pendapatan Non Operasional	2.v,3.23	37,451,085	30,154,850
Beban Non Operasional	2.w,3.24	(42,838,983)	(45,460,801)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**(5,387,898)**	**(15,305,951)**
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		**(4,588,210,021)**	**569,050,296**
Taksiran Pajak Penghasilan	2.x,3.25	-	-
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK		**(4,588,210,021)**	**569,050,296**

Palembang, 22 April 2022

Penyusun	Direview	Disetujui	
M Irfan Ghifari	Eko Kamain	Slamet	Syafril
Staf Akuntansi	Manager Operasional	Direktur	Direktur Utama

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	MODAL DISETOR	SALDO LABA			JUMLAH
		CADANGAN TUJUAN	CADANGAN UMUM	BLM DITENTUKAN TUJUANNYA	
Saldo per 31 Desember 2019	**38.000.000.000**	**-**	**-**	**(5.031.330.855)**	**32.968.669.144**
Selisih pembulatan				1	1
Laba rugi tahun berjalan	-	-	-	569.050.296	569.050.296
					-
Saldo per 31 Desember 2020	**38.000.000.000**	**-**	**-**	**(4.462.280.559)**	**33.537.719.441**
				-	-
Laba rugi tahun berjalan	-	-	-	(4.588.210.021)	(4.588.210.021)
Saldo per 31 Desember 2021	**38.000.000.000**	**-**	**-**	**(9.050.490.580)**	**28.949.509.420**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAPORAN ARUS KAS
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Laba Neto	(4.588.210.021)	569.050.296
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan aset tetap	181.300.895	123.520.009
Penyisihan kerugian (pembalikan atas penyisihan) untuk :		
Penempatan pada bank lain (selain giro)	-	(47.000.000)
Kredit	(1.562.070.106)	1.329.027.567
Amortisasi		
Provisi	(132.267.214)	(55.199.896)
Aset Tak Berwujud	11.391.695	2.362.500
PERUBAHAN ASET DAN KEWAJIBAN OPERASI		
Penempatan Pada Bank Lain	(8.930.538.780)	(6.989.039.540)
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(235.507.152)	202.958.726
Kredit Yang Diberikan	10.133.745.272	(259.569.296)
Restrukturisasi Kredit	(67.068.152)	(19.690.368)
Agunan Yang Diambil Alih	(563.142.647)	(820.000.000)
Aset Lain-lain	251.752.490	301.956.871
Kewajiban Segera Dibayar	65.400.686	548.731.611
Utang Bunga	(54.134.934)	42.297.823
Simpanan		
Tabungan	334.498.051	42.691.391
Deposito Berjangka	5.681.898.907	2.554.307.787
Simpanan dari Bank Lain	(500.000.000)	2.500.000.000
Kewajiban Imbalan Kerja	268.698	841.240
Kewajiban Lain-lain	(12.130.688)	4.113.481
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	**15.187.000**	**31.360.200**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/ penjualan Aset Tetap dan inventaris	(110.709.500)	(87.128.000)
Pembelian/ penjualan Aset Tidak Berwujud	(85.000.000)	(2.835.000)
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(195.709.500)**	**(89.963.000)**
ARUS KAS DARI PENDANAAN		
Selisih pembulatan	-	-
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**-**	**-**
KENAIKAN/(PENURUNAN) ARUS KAS	**(180.522.500)**	**(58.602.800)**
KAS AWAL PERIODE	**846.193.900**	**904.796.700**
KAS AKHIR PERIODE	**665.671.400**	**846.193.900**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi Perseroan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2021 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2020 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya, PT BPR Palembang mengacu pada Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) PA BPR di Indonesia sebagai basis penyusunan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan oleh perseroan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar :

- Dasar akrual *(accrual basis)* , kecuali tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing dicatat atas dasar kas basis.
- Biaya historis *(historical cost)* , kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan peraturan pemerintah, penyertaan saham tertentu yang dicatat berdasarkan metode ekuitas dan surat-surat berharga tertentu yang dinilai berdasarkan nilai pasar serta aset yang menurut standar akuntansi harus dilakukan penilaian uang.

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah.

b. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari harga yang dibebankan. Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang biasanya terjadi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya
- Transaksi antara entitas dengan entitas lain dimana kedua entitas tersebut dibawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu
- Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang bukan ditanggung oleh entitas pelapor

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

c. Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.

Mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Mata uang dimaksud tidak termasuk dalam pengertian kas dan disajikan dalam aset lain-lain.
Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*) dan mata uang emas.

d. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar *(perfoming)* yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

e. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan Pada Bank Lain terdiri dari: giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum.

1. Giro pada bank umum
   Merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.

2. Tabungan pada bank lain
   Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito pada bank lain
   Merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan *deposit on call. Deposit on call* adalah deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

4. Sertifikat deposito
   merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

e. Penempatan Pada Bank Lain (*Lanjutan*)

5. Penempatan pada bank syariah
   merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah.

f. Kredit Yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Pokok kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur (biasa disebut sebagai baki debet).

Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit. Biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan apabila tidak terdapat penyaluran kredit.

Provisi kredit adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

g. Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan

Kredit :
Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.

Penghapusbukuan Kredit *(Hapus Buku)* adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur.
Penghapusan Hak Tagih Kredit *(Hapus Tagih)* adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan

Penempatan pada bank lain :
Penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas tabungan atau deposito tersebut disajikan sebagai pengurang *(offsetting account)* dari tabungan atau deposito tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

h. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

i. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan *(cost)* dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus *(straight-line method)* sesuai dengan taksiran masa manfaat ekonomisnya.

Pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat keekonomian di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan (kapitalisasi).

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba/rugi yang terjadi dibukukan sebagai pendapatan atau biaya pada periode bersangkutan.

j. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada).

k. Aset Lain - Lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Aset lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca

l. Kewajiban Segera

Kewajiban segera adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar.

m. Utang Bunga

Utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti sewa pembiayaan, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, modal pinjaman dll.

Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

n. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
Dalam kegiatan pengumpulan dana masyarakat, BPR menjual produk simpanannya kepada nasabah berupa tabungan dan deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

o. Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.

1. Tabungan dari bank lain
   Tabungan disajikan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan
2. Deposito dari bank lain
   - Deposito disajikan sebesar jumlah nominalnya atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan.
   - Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga

p. Kewajiban Imbalan Kerja

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja.am pos tersendiri. Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja.

q. Kewajiban Lain - Lain

Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan.
Termasuk dalam Kewajiban Lain-lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

r. Modal

1. Modal Disetor
   - Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas.
   - Modal disetor dicatat berdasarkan:
     a) Jumlah uang yang diterima.
     b) Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
     c) Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

r. Modal (*Lanjutan*)

d) Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.

e) Nilai wajar aset non-kas yang diterima.
Setoran saham dalam bentuk aset non-kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetor aset non-kas.

- Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

2. Tambahan Modal Disetor (*Agio Saham)*
   - Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik berupa dana kas maupun aset non- kas.
   - Penambahan pos Tambahan Modal Disetor diakui pada saat:
     a) dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik sebesar kas yang diterima;
     b) dilakukan penambahan setoran aset non-kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

3. Modal Sumbangan
   - Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas atau aset non-kas dari pemilik.
   - Modal sumbangan berupa kas dinilai sebesar kas yang diterima.
   - Sumbangan berupa aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar aset non-kas yang diterima.

Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas)

Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM – Ekuitas) adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Dana setoran modal yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku direklasifikasi dari kewajiban (DSM – Kewajiban) ke ekuitas (DSM – Ekuitas) sebesar jumlah dana yang memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi

Laba/Rugi yang Belum Direalisasi adalah selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap adalah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

s. Saldo laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap.
Saldo laba dikelompokkan menjadi:

1. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
2. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal, dan
3. Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:
   - laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan
   - laba rugi periode berjalan

t. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.
Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana BPR pada aset produktif, dimana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh BPR (biaya transaksi).
Provisi adalah biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

Biaya Transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya *marketing fee*. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit.
Pendapatan Operasional Lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR.

u. Beban Operasional

Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR
Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

v. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non-operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

w. Beban Non Operasional

Beban non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*LANJUTAN*)

x Taksiran Pajak penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak kini yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

Beban Pajak Kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Kas

	2021	2020
Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut ini:		
- Kas Dalam Khasanah	665.671.400	846.193.900
Saldo Kas	**665.671.400**	**846.193.900**

3.2 Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima per 31 Desember masing-masing untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima		
- Pend. Bunga Kredit PNS	24.215.007	138.532.717
- Pend. Bunga Kredit Pedagang/Umum	102.620.643	29.250.960
- Pend. Bunga Kredit Multiguna	191.666.142	309.445.696
- Pend. Bunga Kredit Investasi	219.425.579	114.052.664
- Pend. Bunga Kredit KPR Umum	64.625.632	52.279.123
- Pend. Bunga Deposito Bank	-	57.296.043
- Pend Bng Krd Pasar Wong Kito	150.000	1.389.000
- Pend Bng Krd Pnsgapok	11.258.011	12.024.482
- Pend Bng Krd Pnstukin	131.285.367	253.172.773
- Pend Bng Krd Pnshonorer	37.056.180	14.012.429
- Pend Bng Krd Chann Sert Diknas	86.579.027	1.541.392
- Pend Bng Krd Chann Sert Kemena	31.616.315	-
- Pend Bng Krd Usaha Klp Musi	95.088.238	-
- Pend Bng Krd Sertif Diknas	702.258	-
Pend. Bng Yad Depo Bank	47.856.164	
- Pend Bga Ditangguhkanpedagang	-	(1.200.993)
- Pend Bga Ditangguhkan Kmg	-	(146.608.427)
Pend Bga Ditangguhkankpr Umum	-	(26.550.448)
Saldo Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	**1.044.144.562**	**808.637.411**

3.3 Penempatan pada Bank Lain

	2021	2020
Penempatan pada Bank Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 terinci berikut ini:		
Giro Pada Bank Lain terdiri dari:		
- PT Bank Sumsel Babel, 1403059452	2.322.673.177	1.080.623.652
- PT Bank Sumsel Atmo, 1506103794	3.880.000	4.000.000
- PT Bank Muamalat, 3650002306	9.379.178	9.559.178
- PT Bank Permata Syariah, 971210222	3.879.625.657	824.095.335
Saldo Dipindahkan	***6.215.558.013***	***1.918.278.166***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.3 Penempatan pada Bank Lain (*Lanjutan*)

Saldo Pindahan	***6.215.558.013***	***1.918.278.166***
- PT Bank Mandiri, 113-00-1106107-8	2.196.879.926	693.054.484
- PT Bank Syariah Mandiri, 7105206725	5.244.388	6.573.008
- PT Bank Jawa Barat & Banten, 0084764019001	103.451.628	102.979.480
- Giro Bank Maspion Cab.Palemban	5.134.562.767	2.516.426.653
Saldo Giro	13.655.696.722	5.237.311.791
Tabungan Pada Bank Lain:		
- Bank Permata Kc Syariah Dhani Effendi	3.339.271	9.054.181
- Tabungan Jtrust Bank	1.629.746.674	1.539.364.389
- Bank Maspion Kc Palembang	506.466	501.436
- Tabungan Baturaja	464.868.813	37.387.370
Saldo Tabungan	2.098.461.224	1.586.307.376
Deposito Pada Bank Lain terdiri dari:		
- PT BPR Sumsel	2.000.000.000	3.000.000.000
- Deposito PT BPR Hoki	3.000.000.000	-
- Deposito Raga Dana Sejahtera	1.000.000.000	-
- PT BPR Baturaja	4.900.000.000	5.900.000.000
- PT BPR Serang	1.500.000.000	1.500.000.000
- PT BPR Gerbang Serasan	1.500.000.000	2.500.000.000
- PT BPR Agritrans Batumarta	2.000.000.000	3.000.000.000
- Deposito Bpr Jorong Kampung Ta	500.000.000	500.000.000
- Deposito Bpr Utomo Manunggal S	2.000.000.000	2.000.000.000
Saldo Deposito	18.400.000.000	18.400.000.000
Saldo Penempatan Pada Bank Lain	**34.154.157.946**	**25.223.619.166**
Atas penempatan pada Bank Lain ini dibentuk cadangan Penyisihan Kerugian sebesar	-	-

Adapun rincian pembentukan penyisihan penempatan pada bank lain adalah :

Saldo Awal tahun	-	47.000.000
Pembentukan PPAP Tahun Berjalan	-	75.937.193
Penyisihan (pemulihan) beban PPAP	-	(122.937.193)
Saldo akhir	-	-

3.4 Kredit yang Diberikan

	2021	**2020**
Kredit Yang Diberikan Kepada pihak III terdiri dari:		
- Kredit PNS	2.750.984.573	9.266.104.445
- Kredit Perdagangan Umum	1.326.245.406	1.656.322.694
Saldo Dipindahkan	***4.077.229.979***	***10.922.427.138***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.4 Kredit yang Diberikan (*Lanjutan*)

Saldo Pindahan	***4.077.229.979***	***10.922.427.138***
- Kredit Multiguna	8.685.925.833	11.912.508.558
- Kredit Rekening Koran	-	3.823.753.214
- Kredit Investasi	3.261.710.509	5.352.235.460
- Kredit Pasar Wong Kito	16.749.998	4.462.500.000
- Kredit Program	-	48.333.332
- Kredit KPR Umum	1.151.617.476	1.331.210.869
- Kredit Pns Gapok	1.761.545.122	1.319.946.625
- Kredit Pns Tukin	20.819.690.603	20.035.937.863
- Kredit Pns Honorer	2.305.731.844	1.069.349.550
- Kredit Channel Sertif Diknas	2.352.792.947	54.100.543
- Kredit Channel Sertif Kemenag	784.854.638	-
- Kredit UMKM 1 Bulan	404.441.009	-
- Kredit Usaha Kelompok Musi	4.245.833.323	-
- Kredit Sertifikasi Diknas	330.434.598	-
Saldo	**50.198.557.879**	**60.332.303.151**

Kredit Yang Diberikan berdasarkan kolektabilitas terdiri dari:

- Lancar	35.191.469.966	38.570.822.040
- Dalam Perhatian Khusus	5.830.853.775	10.477.779.172
- Kurang Lancar	1.306.718.530	1.166.198.680
- Diragukan	3.748.627.718	1.741.071.831
- Macet	4.120.887.890	8.376.431.429
Saldo	**50.198.557.879**	**60.332.303.151**

Kredit Yang Diberikan-Provisi dan Administrasi terdiri dari:

- Kredit -Provisi	245.989.241	378.256.455
- Restrukturisasi Kredit	-	128.465.443
- Pend. Bunga Kyd Ditangguhkan	61.397.291	-
Saldo	307.386.532	506.721.898

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sejumlah tersebut di atas terdiri dari:

- PPAP Kredit Yang diberikan	2.715.209.204	4.277.279.310
Saldo Kredit Neto	**47.175.962.143**	**55.548.301.943**

Adapun rincian pembentukan penyisihan kredit yang diberikan adalah :

Saldo Awal tahun	4.277.279.310	2.948.251.744
Pembentukan PPAP Tahun Berjalan	6.798.365.816	1.600.108.722
Penyisihan (pemulihan) beban PPAP	(419.921.487)	(271.081.156)
Hpaus Buku tahun 2021	(7.940.514.435)	-
Saldo akhir	2.715.209.204	4.277.279.310

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.4 Kredit yang Diberikan (*Lanjutan*)

Managemen berpendapat bahwa jumlah penyisishan penghapusan kredit yang telah dibukukan adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

3.5 Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih per 31 Desember 2021 dan 2020 terinci berikut ini:	**2021**	**2020**
Agunan Yang Diambil Alih	3.283.142.647	2.720.000.000
Saldo Agunan Yang Diambil Alih	3.283.142.647	2.720.000.000

3.6 Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap dan inventaris per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah
Rincian dari aset tetap dan inventaris adalah berikut ini:

Keterangan	**31 Des 2020 Rp.**	**Penambahan Rp.**	**Pengurangan Rp.**	**31 Des 2021 Rp.**
Harga Perolehan				
Kendaraan	-	-	-	-
Peralatan dan Perl	928.297.370	16.691.500	-	944.988.870
Komputer	384.134.220	94.018.000	-	478.152.220
Jumlah Hrg Perolehan	**1.312.431.590**	**110.709.500**	**-**	**1.423.141.090**
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	-	-	-	-
Peralatan dan Perl	683.795.160	121.908.097	-	805.703.257
Komputer	286.107.351	59.392.798	-	345.500.149
Jumlah Akumulasi	**969.902.511**	**181.300.895**	**-**	**1.151.203.406**
Nilai buku Aset dan Inv.	**342.529.079**	**-**	**-**	**271.937.684**

Keterangan	**31 Des 2019 Rp.**	**Penambahan Rp.**	**Pengurangan Rp.**	**31 Des 2020 Rp.**
Harga Perolehan				
Kendaraan	15.830.000	-	15.830.000	-
Peralatan dan Perl	890.397.370	37.900.000	-	928.297.370
Komputer	319.076.220	65.058.000	-	384.134.220
Jumlah Hrg Perolehan	**1.225.303.590**	**84.093.000**	**-**	**1.312.431.590**
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	8.244.800	-	8.244.800	-
Peralatan dan Perl	596.038.941	87.756.219	-	683.795.160
Komputer	242.098.762	44.008.589	-	286.107.351
Jumlah Akumulasi	**846.382.503**	**240.667.196**	**-**	**969.902.511**
Nilai buku Aset dan Inv.	**378.921.087**	**-**	**-**	**342.529.079**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.7 Aset Tidak Berwujud	**2021**	**2020**
Saldo Aset tidak berwujud per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
- Aset Tak Berwujud	104.505.000	19.505.000
- Amortisasi Aktiva Tidak Berwuj	(28.004.999)	(16.613.304)
Saldo Aset Tidak Berwujud	**76.500.001**	**2.891.696**

3.8 Aset Lain-Lain	**2021**	**2020**
Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:		
Biaya Dibayar Dimuka		
- BDD-Asuransi Kas	302.916	300.500
- BDD-Sewa Gedung Kantor	243.374.999	567.875.000
- Bdd Promosi Kantor	-	0,02
- Bdd personalia	30.000.000	30.000.000
- Bdd Jasa Hukum	75.000.000	
Persediaan		
- Persediaan Alat Tulis Kantor	4.905.358	5.126.773
- Persed. Barang Cetakan	22.001.200	24.442.900
- Persediaan Materai Tempel	930.000	486.000
Tagihan Lancar Lainnya		
- Tagihan Pihak Ketiga	55.931.607	55.967.397
Saldo Aset Lain-Lain	**432.446.079**	**684.198.570**

3.7 Perjanjian Kontrak-Sewa Bangunan-Ruko-Kantor yang telah dilakukan PT BPR Palembang dengan Nyonya Khoe Siu Lie, Erlin pada tanggal 11 Agustus 2017 yaitu 2 (dua) pintu bangunan toko (ruko) beertingkat 3 (tiga) lantai yang terbuat dari batu dan beton, dilengkapi dengan fasilitas langganan listrik dan 1 (satu) bidang tanah kosong, ke-2 (dua) ruko tersebut serta 1 (satu) bidang tanah terletak di Provisi Sumatera Selatan.

Perjanjian Kontrak-Sewa ini diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022, dengan catatan dapat diperpanjang setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak 6 (enam) bulan sebelum berakhir jangka waktu sewa menyewa tersebut.

Harga Kontrak-Sewa selama perjanjian 5 (lima) tahun sebesar Rp 1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pajak atas sewa ditanggung oleh Nyonya Khoe Siu Lie, Erlin, jumlah tersebut telah dibayar lunas sesuai kwitansi dan telah dipotong disetorkan pajak atas Kotrak-Sewa tersebut sebesarRp 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.9 Kewajiban Segera

Kewajiban Segera per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri	2021	2020
Kewajiban Segera Kepada Pemerintah		
- KS. Pot.PPH 21 Gaji	13.884.651	14.408.371
- KS. Pot. PPH Pasal 4 ayat 2 Bunga Deposito	36.753.313	42.976.484
- Pph Pasal 23 Bunga Tabungan	2.002.532	
- KS. Pot.PPH 23	117.509	326.015
Kewajiban Segera Kepada Pihak Lain		
- Premi BPJS Ketenagakerjaan	19.984.661	16.467.879
- Premi BPJS Kesehatan	6.130.432	6.116.785
- Cadangan Tunjangan THR	411.044.873	325.674.322
- Dana Purnajabatan Dekom	3.396.250	158.588.750
- Dana Purnajabatan Direksi	39.771.875	192.596.875
- Cadangan Cuti Tahunan	96.850.890	70.267.946
- Titipan Notaris	-	650.000
- Titipan Lainnya	31.788.419	21.582.472
- Cadangan Pendidikan dan Pelatihan SDM	4.130.327	94.973.838
- Titipan Asuransi Kredit Program	-	41.730
- Titipan Angsuran Kredit Program	1.250.000	1.250.000
- Premi Asuransi Jaminan Kredit	-	351.350
- KYSD-Lainnya	326.113.431	205.620.458
- Titipan Nasabah	190.183.056	-
- Cad Kompensasi Krywn Kontrak	33.891.743	-
Saldo Kewajiban Segera	**1.217.293.962**	**1.151.893.276**

3.10 Utang Bunga

Utang Bunga per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:	2021	2020
Bunga Tabungan		
- Tabungan Pasar Perdana Perorangan	3.650.715	18.870.611
- Tabungan Pasar Perdana Non Perorangan	1.132.102	3.981.706
Bunga Deposito YMHD		
- Bunga Deposito 1 bulan YMHD	28.843.492	21.311.123
- Bunga Deposito 3 bulan YMHD	17.741.874	13.316.365
- Bunga Deposito 6 bulan YMHD	12.510.718	35.609.571
- Bunga Deposito 12 bulan YMHD	26.884.587	20.107.850
Bunga Deposito Jatuh Tempo		
- Utang Bunga Deposito Jatuh Tempo	36.340.805	51.555.694
Bunga Deposito ABP		
- Bunga Deposito ABP 1 bulan YMHD	3.835.616	5.465.753
- Bunga Deposito ABP 3 bulan YMHD	2.498.630	6.293.151
- Bunga Deposito ABP 6 bulan YMHD	32.527.395	43.589.041
Saldo Utang Bunga	**165.965.933**	**220.100.867**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.11 Simpanan

Simpanan per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:	2021	2020
- Tabungan		
- Tabungan Pasar Perdana	5.294.592.947	5.254.287.182
- Tabungan Pasar Perdana Non Perorangan	1.521.763.579	1.227.571.480
- Tabungan Pelajar Palembang	20.187	20.000
Jumlah Simpanan Tabungan	6.816.376.713	6.481.878.662
- Deposito Berjangka		
- Deposito 1 bulan	9.257.380.816	6.544.482.691
- Deposito 3 bulan	5.269.410.618	3.031.000.000
- Deposito 6 bulan	10.963.689.355	13.840.122.000
- Deposito 12 bulan	9.560.522.809	5.953.500.000
Jumlah Simpanan Deposito Berjangka	35.051.003.598	29.369.104.691
Saldo Simpanan	**41.867.380.311**	**35.850.983.353**

3.12 Simpanan dari Bank Lain

Simpanan Dari Bank Lain per 31 Desember 2021 dan 2020	2021	2020
- Deposito		
- PT BPR Multi Dana Mandiri	500.000.000	500.000.000
- PT BPR Multi Dana Mandiri	500.000.000	500.000.000
- PT BPR Multi Dana Mandiri	800.000.000	800.000.000
- PT BPR Multi Dana Mandiri	200.000.000	200.000.000
- PT BPR Mitra Central Dana	500.000.000	500.000.000
- PT BPR Mitra Central Dana	400.000.000	400.000.000
- PT BPR Sumatera Selatan	2.000.000.000	2.000.000.000
- PT BPR Catur Mas	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Prima Dana Abadi	-	1.000.000.000
- PT BPR Musi Artha Surya	-	1.500.000.000
- PT BPR Bintang Dana Persada	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Sukasada	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Sukasada	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Tri Gunung Selatan	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Tri Gunung Selatan	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Berkat Sejati	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Berkat Sejati	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT BPR Natasha Bintang Anugrah	1.000.000.000	-
- PT BPR Natasha Bintang Anugrah	1.000.000.000	-
Saldo Simpanan Dari Bank Lain	**14.900.000.000**	**15.400.000.000**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.13 Kewajiban Imbalan Kerja

Saldo Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:	2021	2020
Kewajiban Imbalan Kerja	3.812.838	3.544.140
Saldo Kewajiban Imbalan Kerja	**3.812.838**	**3.544.140**

3.14 Kewajiban Lain-lain

Saldo Kewajiban Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:	2021	2020
Kewajiban Lain-lain		
- Setoran Angsuran Pinjaman Bendahara	-	12.130.688
Saldo Kewajiban Lain-lain	**-**	**12.130.688**

3.15 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:	2021	2020
Modal		
- Modal Dasar	100.000.000.000	100.000.000.000
- Modal yang belum disetor	(62.000.000.000)	(62.000.000.000)
- Modal disetor	38.000.000.000	38.000.000.000
Saldo Laba		
- Laba/Rugi Tahun Lalu	(4.462.280.559)	(5.031.330.855)
- Laba/Rugi Tahun Berjalan	(4.588.210.021)	569.050.296
Saldo Ekuitas	**28.949.509.420**	**33.537.719.441**

3.16 Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga periode Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:	2021	2020
Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan:		
Jasa Giro	228.103.465	281.107.637
Tabungan	92.744.949	40.250.180
Deposito	1.381.406.474	1.870.194.984
Jumlah	1.702.254.888	2.191.552.801
Pendapatan bunga kredit yang diberikan kepada pihak ketiga		
- Pend. Kredit Pns	843.975.817	3.830.481.532
- Pend. Kredit Pedagang / Umum	145.375.773	389.898.557
- Pend. Kredit Multiguna	347.168.664	1.419.728.399
- Pend. Bng Krd Investasi	544.926.922	907.582.299
- Pend. Bunga Kredit Program	-	878.130.000
- Pend Bng Krd Pasar Wong Kito	5.271.000	28.554.000
- Pend Bung Krd Kpr Umum	222.306.655	191.185.939
- Pend. Bng. Krd Inst Gas	-	6.903.391
Saldo Dipindahkan	***2.109.024.830***	***7.652.464.116***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.16 Pendapatan Bunga (*Lanjutan*)

Saldo Pindahan	***2.109.024.830***	***7.652.464.116***
- Pend Bng Krd Pnsgapok	230.446.140	105.702.397
- Pend Bng Krd Pnstukin	6.578.548.536	3.068.604.135
- Pend Bng Krd Pnshonorer	725.214.347	261.727.995
- Pend Bng Krd Chan Sert Diknas	137.424.029	14.359.009
- Pend Bng Krd Chann Sert Kemena	51.548.269	-
- Pend Bng Krd Chan Talangn Skpd	12.631.906	-
- Pend Bng Krd Chan Tukin Pns	-	12.446.017
- Pend Bng Krd Usaha Klp Musi	539.501.517	-
- Pend Bng Krd Sertifikasi Dikna	10.055.230	-
Jumlah	10.394.394.805	11.115.303.669
Jumlah pendapatan bunga kontraktual	**12.096.649.692**	**13.306.856.470**

Pendapatan provisi dan Aministrasi adalah berikut ini:

Provisi		
- Pendapatan Bunga Provisi Kredit	373.869.604	464.969.896
Jumlah	373.869.604	464.969.896
Administrasi		
- Pendapatan administrasi Kredit	371.105.000	417.307.000
Jumlah	371.105.000	417.307.000
Jumlah Pendapatan Provisi dan Administrasi	**744.974.604**	**882.276.896**
Biaya Transaksi	227.029.975	335.131.782
Jumlah	227.029.975	335.131.782

3.17 Pendapatan Operasional Lainnya

Rincian pendapatan operasional lainnya yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah berikut i

	2021	**2020**
Pendapatan operasional lainnya		
- Pend. Appraisal Agunan	3.000.000	7.500.000
- Pend. Administrasi Tabungan	60.000	168.703
- Pendapatan Fee Komisi/Discount Dll	24.817.524	22.044.448
- Fee Adm Transfer	1.804.300	1.371.000
- Pendapatan Penggantain Materai	300.000	1.944.000
Pemulihan PPAP		
- Pemulihan PPAP Kredit	419.921.487	394.018.349
- Denda / Penalty Pinjaman	338.938.556	364.348.125
Pend. Lainnya		
- Lainnya	673	94.966
- Penermn Aset Prod Yg Dihps Bku	174.523.878	
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	**963.366.419**	**791.489.589**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.18 Beban Bunga

Beban bunga untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 terinci berikut ini:

	2021	2020
Beban Bunga Tabungan Pihak Ketiga Bukan Bank		
- Beban Bunga Tabungan Pasar Per	240.534.900	223.876.595
- Beban Bunga Tabungan Pasar Perusahaan	37.354.673	48.891.019
Beban Bunga Deposito Pihak Ketiga Bukan Bank		
- Deposito 1 bulan	589.486.070	658.019.029
- Deposito 3 bulan	274.841.144	864.259.236
- Deposito 6 bulan	806.711.890	916.852.230
- Deposito 12 bulan	636.639.630	532.095.507
Beban Bunga Simpanan dari Bank		
Beban Bunga Deposito Bank Lain	1.025.178.080	1.357.353.424
Biaya Transaksi Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	-	41.320.478
Beban Bunga Lainnya		
- Beban Bunga Premi Penjaminan Simpanan (LPS)	106.120.209	124.993.420
Jumlah Beban Bunga	**3.716.866.596**	**4.767.660.938**

3.19 Beban Penyisihan Kerugian

	2021	2020
Beban penyisihan kerugian untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020; adalah berikut ini:		
- Penyisihan kerugian tabungan/deposito	-	75.937.193
- Penyisihan kerugian kredit	6.798.365.816	1.600.108.722
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian	**6.798.365.816**	**1.676.045.916**

3.20 Beban Pemasaran

	2021	2020
Beban pemasaran merupakan beban iklan dan promosi		
- Beban Promosi-Hadiah DPK	81.647.000	100.581.208
Jumlah Beban Pemasaran	**81.647.000**	**100.581.208**

3.21 Beban Administrasi Umum

	2021	2020
Beban Administrasi Umum, utk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 terinci berikut ini :		
- Beban tenaga kerja untuk periode yang berakhir tanggal per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
- Gaji Pokok Direksi Dan Karyaaw	2.206.278.510	1.994.112.246
- Tunjangan Hari Raya (Thr)	475.992.800	371.464.447
- Tunjangan Komunikasi Direksi	57.000.000	57.000.000
- Tunjangan Makan & Transport Ka	332.000.000	277.875.000
- Tunjangan Perumahan Direksi	57.000.000	57.000.000
- Tunjangan Jabatan Kabag	126.500.000	118.850.000
Saldo Dipindahkan	***3.254.771.310***	***2.876.301.693***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.21 Beban Administrasi Umum (*Lanjutan*)

Saldo Pindahan	***3.254.771.310***	***2.876.301.693***
- Tunjangan Cuti Tahunan	247.163.893	141.466.933
- Tunjangan Purnajabatan Direksi	101.887.500	395.088.546
- Tunjangan Komunikasi Karyawan	-	2.200.000
- Tunjangan Teller	-	150.000
- Tunjangan Kosmetik	-	300.000
- Tunjangan Jabatan Direksi	407.550.000	407.550.000
- Tunjangan Service Motor	21.000.000	1.750.000
- Tunjangan Head Teller	-	400.000
- Fasilitas Kendaraan	171.000.000	171.000.000
- Tunjangan Keahlian	-	600.000
- Honorarium Bulanan Dewan Komisaris	612.807.000	747.621.996
Tenaga Kerja Lainnya		
- Uang Lembur	65.456.741	71.721.114
- Biaya Bpjs Ketenagakerjaan	133.578.273	112.976.284
- Biaya Bpjs Kesehatan	55.317.133	52.377.332
- Biaya Perjalanan Dinas	33.259.269	17.117.179
- Biaya Tunjangan Pph Pasal 21 D	137.775.000	139.090.057
- Biaya Tunjangan Pph Pasal 21 K	5.402.170	7.017.894
- Biaya Tunjangan Pph Pasal 21 K	1.709.703	-
- Premi Asuransi Ksehatn Direksi	63.600.000	58.000.000
- Jasa Pengamanan/Outsorching	307.577.350	277.389.028
- Imbalan Pasca Kerja	44.711.394	75.017.067
- Biaya Rekrutment	526.800	76.850.900
- Uang Kompensasi Krywn Kontrak	68.651.831	-
Jumlah Beban Tenaga Kerja	5.733.745.367	5.631.986.023
- Beban Pendidikan		
- Beban Pendidikan/ Pelatihan	28.953.232	162.787.280
Jumlah Beban Pendidikan	28.953.232	162.787.280
- Beban sewa untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
- Beban Sewa Kendaraan	100.320.000	100.404.000
- Beban Sewa Gedung Kantor	324.500.001	324.500.000
- Beban Sewa Aplikasi CBS	187.687.500	150.150.000
- Beban Sewa TV Berlangganan	755.000	899.001
Jumlah Beban Sewa	613.262.501	575.953.001

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.21 Beban Administrasi Umum (*Lanjutan*)

- Beban Penyusutan		
- Beban Penyusutan Peralatan Kantor	121.908.097	87.756.219
- Beban Penyusutan Komputer	59.392.798	44.008.589
- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.726.695	2.362.500
- Amor Instalasi&Lisensi Aplikas	8.500.000	
Jumlah Beban Penyusutan	195.527.590	134.127.309
- Beban Premi Asuransi		
- Premi Asuransi Uang Tunai	3.632.584	3.906.500
Jumlah Beban Premi Asuransi	3.632.584	3.906.500
- Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
Beban Barang dan Jasa		
- Alat Tulis, Kertas Dan Am	58.171.615	59.311.251
- Barang Cetakan	41.462.700	40.795.100
- Pengiriman Dokumen, Surat Dan	2.100.000	2.516.000
- Materai, Perangko, Benda Pos	4.742.000	6.191.000
- Rekening Listrik	108.017.737	106.765.779
- Rekening Air (Pdam)	7.295.240	10.024.180
- Rekening Telepon, Facximile Da	22.830.214	22.278.359
- Transportasi	300.000	-
- Administrasi Bank	3.001.990	2.595.000
- Konsumsi/Makan Karyawan/Pengur	12.841.400	6.966.000
- Seragam Karyawan/Pengurus	160.000	63.979.090
- Baterai,Tinta, Stempel	1.797.000	3.949.000
- Gula, Kopi, The, Kue, Air Mine	13.866.400	20.835.700
- Toilettries (Tissue, Pengharum	16.621.200	15.479.100
- Perlengkapan Kantor	31.812.350	45.861.982
- Bbm Genset	2.515.361	3.829.973
- Bensin/Solar	49.565.777	52.886.045
- Parkir	1.886.500	3.147.000
- Alat Listrik	1.485.500	6.868.500
- Biaya Buku Bilyet	95.000	105.000
- Biaya Transfer, Kliring, Rtgs,	2.005.650	3.106.500
- Literatur,Majalah Dan Koran	2.270.000	3.240.000
- Biaya Jasa Akuntan Publik	13.600.000	44.800.000
- By Fotocopy,Laminating,Jilid	11.237.790	17.123.790
- By Appraisal Agunan	8.863.636	1.926.100
- Beban Notaris	6.000.000	19.000.000
Saldo Dipindahkan	***424.545.060***	***563.580.449***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.21 Beban Administrasi Umum (*Lanjutan*)

Saldo Pindahan	***424.545.060***	***563.580.449***
- Beban Rapat	21.975.500	26.439.800
- Biaya Jasa Hukum	179.606.828	74.355.500
- Pengganti Komunikasi	57.800.000	46.100.000
- Pengganti Kosmetik	5.100.000	5.100.000
Pengganti Bbm Kendaraan	58.512.000	51.586.000
Pengganti Service Kendaraan	63.350.000	64.400.000
Jumlah Beban Barang dan Jasa	810.889.388	831.561.749
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
- Beban Pemeliharaan Gedung Kantor	1.620.500	30.244.050
- Beban Pemeliharaan Kendaraan Kantor	2.119.400	9.750.640
- Beban Pemeliharaan Inventaris	14.647.800	18.214.000
- Beban Pemeliharaan dan Perbaikan AYDA	4.293.800	2.105.000
Jumlah Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	22.681.500	60.313.690
- Pajak-Pajak non PPh		
- Biaya Pajak Bumi dan Bangunan	7.249.799	7.249.799
Jumlah Beban Pajak Non Pph	7.249.799	7.249.799
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	**7.415.941.961**	**7.407.885.351**

3.22 Beban Operasional Lainnya.

	2021	**2020**
Beban operasional lainnya untuk periode yang Berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
- Fotocopy,Laminating,Jilid	-	329.800
- Biaya Perizinan	300.000	300.000
- Jamuan Makan/Perjalanan Tamu	9.152.500	7.483.480
- Biaya Lelang Agunan	42.181.000	-
- Sumbangan Lainnya	-	500.000
- Biaya Retribusi Kantor	2.425.000	3.410.000
- Biaya Konsumsi Rapat	-	270.000
- Operasional Lainnya	61.522.941	79.392.244
- Operasional Insentif Pemasaran	17.257.500	-
- Biaya Appraisal Agunan	-	5.000.000
- Biaya Aktivitas Karyawan	-	3.425.000
- Biaya Entertainment	15.122.550	8.850.991
Jumlah Beban Operasional Lainnya	**147.961.491**	**108.961.515**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.23 Pendapatan Non Operasional

	2021	2020
Pendapatan non operasional untuk periode yg berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:		
Pendapatan Non Operasional		
- Kelebihan Kas	9.523	10.248
Pendapatan Non Operasional Lainnya	-	20.544.603
- Pendapatan Non Operasional Lainnya	7.841.563	-
- Pend Ganti Rugi Asuransi	25.000.000	-
- Lainnya	4.600.000	9.600.000
Jumlah Pendapatan Non Operasional	**37.451.085**	**30.154.850**

3.24 Beban Non Operasional

	2021	2020
Beban Non Operasional untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sejumlah		
- Biaya Tahunan Ojk	9.694.842	
- Lainnya	31.731.787	-
- Denda / Sanksi Pajak	1.412.354	-
- Lainnya	-	37.875.601
- Penjualan / Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris	-	7.585.200
Jumlah Beban Non Operasional	**42.838.983**	**45.460.801**

3.25 Taksiran pajak penghasilan untuk periode yang berakhir p

	2020	2019
Taksiran pajak penghasilan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar:	-	-

Taksiran pajak tersebut setelah koreksi audit yaitu sebagai berikut:

Pendapatan Bruto :		2021	2020
Bunga Kontraktual		12.096.649.692	13.306.856.470
Provisi dan Administrasi		744.974.604	882.276.896
Biaya Transaksi		(227.029.975)	(335.131.782)
Pendapatan Operasional Lainnya		963.366.419	791.489.589
Pendapatan Bruto	**a**	**13.577.960.740**	**14.645.491.174**
Laba Komersial		**(4.588.210.021)**	**569.050.296**
Koreksi Fiskal Positif:			
Tunjangan Purnajabatan Direksi		101.887.500	395.088.546
Biaya Tunjangan Pph Pasal 21 D		137.775.000	139.090.057
Biaya Tunjangan Pph Pasal 21 K		5.402.170	7.017.894
Imbalan Pasca Kerja		44.711.394	75.017.067
Uang Kompensasi Krywn Kontrak		68.651.831	-
Biaya Pemeliharaan Gedung Kant		1.620.500	30.244.050

Biaya Pemeliharaan Kendaraan K		2.119.400	9.750.640
Saldo Dipindahkan		***362.167.795***	***656.208.254***

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.25 Taksiran Pajak Penghasilan (*Lanjutan*)

Saldo Pindahan		***362.167.795***	***656.208.254***
Biaya Pemeliharaan Inventaris		14.647.800	18.214.000
By Pemeliharaan&Perbaikan Ayda		4.293.800	
Beban Promosi		81.647.000	100.581.208
Gula, Kopi, The, Kue, Air Mine		13.866.400	20.835.700
Pengganti Service Kendaraan		63.350.000	64.400.000
Jamuan Makan/Perjalanan Tamu		9.152.500	7.483.480
Sumbangan Lainnya		-	500.000
Biaya Retribusi Kantor		2.425.000	3.410.000
Biaya Konsumsi Rapat		-	270.000
Biaya Aktivitas Karyawan		-	3.425.000
Biaya Entertainment		15.122.550	8.850.991
Lainnya		1.412.354	37.875.601
Koreksi Fiskal Negatif:			
Pemulihan PPAP		-	-
Laba Fiskal	**b**	**(4.020.124.822)**	**1.491.104.530**
Kompensasi Kerugian Pajak			
Kompensasi Kerugian Pajak	(3.540.226.325)	**-**	**(1.491.104.530)**
Sisa Kompensasi Kerugian	(7.560.351.147)		
Laba Fiskal Setelah Kompensasi		**-**	**-**
Taksiran pajak			
Laba Fasilitas yang dikenakan tarif 22%* 50%		**-**	**-**
Laba Fasilitas yang tidak dikenakan fasilitas dikenakan tarif 22%			
Taksrian Pajak Penghasilan		**-**	**-**
PPh Yang Telah Dibayar PPh 25 s/d November		-	-
Utang Pajak Badan Di Bulan Desember		**-**	**-**
PPh Yang Telah Dibayar PPh 25 Desember		-	-
PPh Kurang (Lebih) Bayar PPh 29/25		**-**	**-**

Dalam menghitung kewajiban perpajakan tahun 2021 Perusahaan yaitu Self Assesment System yaitu menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri oleh staff Akuntansi Perusahaan.

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas pajak perusahaan dan tidak tertutup kemungkinan hasil pemeriksaan berbeda dengan saldo utang pajak tahun 2020 tersebut.

PT BPR Palembang tidak memperhitungakan Taksrian pajak dikarenakan perushaaan masih mengalami kerugian, sehingga PPh pasal 25 Nihil setiap bulannya.

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.25 Rekening Administratif	2021	2020
Rekening Administratif per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:		
Komitmen		
- Fas. Kredit pd Nasabah yang Belum Ditarik	-	426.246.786
- Penerusan kredit (*channelling*)	2.499.982	2.499.982
Kontinjensi		
- Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	1.691.814.443	2.999.953.969
- Aktiva Produktif yg Dihapusbukukan	7.769.175.548	-
- Pendapatan Bunga atas Kredit yang Dihapusbukukan	816.693.097	-
- Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	130.000.000	-
- Tagihan Kontinjensi Lainnya	968.235.000	-

3.26 Informasi Kredit kepada pihak Terkait adalah :

No.	No. Rekening	Hubungan	2021 Baki Debit	2020 Baki Debit
1	00000174	Keluarga Pengurus BPR Palembang	19.151.745	55.824.127
2	00000006	Pengurus BPR Palembang	-	6.962.197
3	00000384	Pengurus Pemegang Saham	-	181.664.620
4	00001913	Pejabat Eksekutif	-	91.243.727
5	00003428	Pengurus Pemegang Saham	-	200.895.758
6	00007589	Pejabat Eksekutif	-	75.753.228
7	00007639	Pejabat Eksekutif	63.750.982	79.961.750
8	00008475	Keluarga Pemegang Saham	740.748.930	740.748.930
9	00008879	Pejabat Eksekutif	50.853.668	61.120.773
10	00008894	Pengurus BPR Palembang	-	21.433.378
11	00008966	Pejabat Eksekutif	120.023.556	128.139.200
12	00010001	Pengurus Pemegang Saham	134.299.676	250.000.000
13	1400400010303	Pengurus BPR Palembang	167.671.496	-
14	1400400010871	Pengurus Pemegang Saham	115.461.416	-
15	1400400011033	Pejabat Eksekutif	165.187.629	-
16	1400400011089	Pejabat Eksekutif	43.028.058	-
17	1400400011150	Pejabat Eksekutif	102.076.541	-
Total			**1.722.253.697**	**1.893.747.688**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.2′ Informasi Simpanan tabungan pihak Terkait adalah :

No.	No. Rekening	Hubungan	Nominal	Nominal
1	0010100003	Pengurus Pemegang Saham	3.884.595	16.324.329
2	0010100004	Pengurus Pemegang Saham	1.535.905	1.471.909
3	0010100005	Pengurus Pemegang Saham / Pengur	305.165.843	130.983.485
4	0010100010	Pengurus BPR Palembang	5.145.017	3.219.391
5	0010100013	Pejabat Eksekutif	127.261	45.744
6	0010100014	Pengurus BPR Palembang	656.893	530.967
7	0010100024	Pejabat Eksekutif	359.084	57.442
8	0010100026	Pejabat Eksekutif	250.908	4.264.810
9	0010100038	Pejabat Eksekutif	4.148.882	1.004.459
10	0010100041	Pejabat Eksekutif	771.392	1.028.236
11	0010100060	Keluarga Pengurus BPR Palembang	86.027	52.460.715
12	0010100097	Pemegang Saham	18.419.522	17.802.729
13	0010100098	Pemegang Saham	512.583.329	342.663.115
14	0010100099	Pemegang Saham	375.151	362.589
15	0010100303	Keluarga Pengurus BPR Palembang	332.454	75.483
16	0010101794	Keluarga Pejabat Eksekutif	-	18.473
17	0010102359	Pejabat Eksekutif	2.102.422	532.914
18	0010104149	Pejabat Eksekutif	31.498	51.203
19	0010105111	Keluarga Pejabat Eksekutif	-	5.009.966
20	0010105137	Pejabat Eksekutif	17.938	17.190
21	0010105285	Pejabat Eksekutif	17.938	17.190
22	0010116147	Pengurus Pemegang Saham	12.525.316	18.926.149
23	0010116431	Keluarga Pengurus BPR Palembang	175.416	168.107
24	0010116503	Keluarga Pengurus BPR Palembang	46.069.075	36.278.362
25	0010116643	Keluarga Pengurus BPR Palembang	97.151	93.104
26	0010126681	Keluarga Pejabat Eksekutif	-	20.393
27	0010126690	Keluarga Pejabat Eksekutif	-	112.302
28	0010134455	Pejabat Eksekutif	2.751.037	1.217.607
29	0010137861	Keluarga Pejabat Eksekutif	-	3.231.510
30	0010143888	Keluarga Pejabat Eksekutif	-	14.268.863
31	0010200001	Pemegang Saham	167.394.096	140.715.672
32	0010200016	Group Usaha Pemegang Saham	649.075.095	441.677.588
33	0010200024	Group Usaha Pemegang Saham	34.176.371	33.031.948
34	0010200100	Pemegang Saham	37.257.903	36.428.171
35	0010200101	Pemegang Saham	21.898.368	21.165.083
36	0010174791	Keluarga Pemegang Saham	6.250.793	6.041.526
37	0010176841	Keluarga Pengurus BPR Palembang	5.064.486	4.783.500
38	0010178878	Pejabat Eksekutif	11.848	50.394
39	3300100173434	Pengurus BPR Palembang	2.944.876	-
40	3300100190444	Pejabat Eksekutif	2.074.270	-
Total			**1.843.778.160**	**1.336.152.618**

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (*LANJUTAN*)

3.28 Informasi Simpanan Deposito pihak Terkait adalah :

No.	No. Bilyet	Hubungan	Nominal	Nominal
1	0000117	Pemegang Saham	-	150.000.000
2	0000182	Keluarga Pengurus BPR Palembang	1.000.000	1.000.000
3	0000330	Keluarga Pengurus BPR Palembang	150.000.000	150.000.000
4	0000434	Keluarga Pejabat Eksekutif	-	500.000.000
5	0000437	Pengurus BPR Palembang	-	25.000.000
6	0000447	Keluarga Pejabat Eksekutif	-	500.000.000
7	0000458	Pengurus BPR Palembang	5.000.000	5.000.000
8	0000489	Pemegang Saham	-	500.000.000
9	0000531	Keluarga Pemegang Saham	434.003.434	400.000.000
10	0000564	Pejabat Eksekutif	50.100.000	50.100.000
11	0000691	Pengurus BPR Palembang	15.000.000	-
Total			**655.103.434**	**2.281.100.000**

5. PENGUNGKAPAN LAINNYA

a. Pendirian Perusahaan

PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat selanjutnya disebut PT BPR Pasar didirikan dengan Akte Nomor : 14 tanggal 08 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang, berkedudukan di Palembang dan Akte pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-28879AH.01.01 Tanggal 29 Mei 2013.

PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat telah mengalami beberapakali Perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Akta Notaris No. 03 tanggal 05 Desember 2016 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0023438.AH.01.02 tanggal 07 Desember 2016.

Berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 05 Oktober 2017 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang PT Bank Perkreditan Rakyat Pendanaan Sarana Rakyat telah mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0021188.AH.01.02 tanggal 12 Oktober 2017.

b. Tempat dan Kedudukan

Jl. R. Sukamto No. 2 C-D, Rt.042 Rw. 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang 30114, Sumatera Selatan, Indonesia.
No. Telepon (0711) 5630071/5630092.
Website : bankbprpalembang.com
Email : bprpalembang@bankbprpalembang.com

c. Perijinan Usaha

Dalam melaksanakan usahanya, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang memiliki perijinan sebagai berikut :

- Surat Izin Prinsip Bank Indonesia tanggal 26 Maret 2013 dengan Nomor 15/83/DKBU.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang dengan nomor 060616408814 tertanggal 6 Januari 2016, masa berlaku hingga 6 Januari 2021.
- Surat Izin Gangguan No: 503/IG.R/7451/BPM-PTSP/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 07 Desember 2015.
- Nomor Pokok Wajib Pajak dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur dengan Nomor NPWP: 02.298.251.4-301.000.
- Izin Usaha dari Otoritas Jasa keuangan NOMOR KEP-85/d.03/2015
- Izin Perubahan Nama BPR dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-56/KR.07/2017

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA (*LANJUTAN*)

d. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan mendirikan perusahaan ini adalah berusaha dibidang Bank Perkreditan Rakyat dengan melaksanakan kegiatan usaha :

- Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan,
- Memberikan kredit pinjaman
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan pada bank Lain.

f. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkuler Para Pemegang Saham PT BPR Palembang No. 34 tanggal 21 Oktober 2019 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang susunan pengurus PT BPR Palembang adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama Tn. Drs. H. Abdul Wahid Syukur
- Komisaris Tn. Drs. H. Sumirin T. Tjinto

Direksi :

- Direktur Utama Tn. Syafril, S.Sos
- Direktur Tn. Slamet, S.E.

Sampai pada akhir pemeriksaan, PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang memiliki karyawan berjumlah 44 sudah termasuk karyawan kontrak dan status percobaan.

g. Modal

PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang telah mengalami beberapa kali Perubahan Anggaran Dasar, dalam Akta Notaris No. 01 tanggal 01 November 2018 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang yaitu Modal Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang terbagi dalam 1.000.000 (satu juta saham) lebar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan kepemilikan sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Perlembar Saham	Persentase	Jumlah Nominal
1.	Pemkot Palembang	260.000	100.000	68,42%	26.000.000.000
2.	PT SP2J	119.400	100.000	31,42%	11.940.000.000
3.	Tn. Ir. Ahmad S.	600	100.000	0,16%	60.000.000
	Total	**380.000**		**100%**	**38.000.000.000**

4. PENGUNGKAPAN LAINNYA (*LANJUTAN*)

g. Modal (*Lanjutan*)

PT Bank Perkreditan Rakyat Pelembang telah mengalami beberapa kali Perubahan Anggaran Dasar, dalam Akta Notaris No. 07 tanggal 11 Mei 2020 dihadapan Notaris Siti Hikmah Nuraeni, SH. di Palembang yaitu Modal Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Palembang sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang terbagi dalam 1.000.000 (satu juta saham) lebar saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dalam Akta Notaris No.07 tanggal 11 Mei 2020 dinyatakan RUPS menyetujui pengalihan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Tuan Insinyur Ahmad Syafriar sebanyak 600 (enam ratus) saham di BPR Palembang kepada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya, sehingga kepemilikan saham berubah menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Perlembar Saham	Persentase	Jumlah Nominal
1.	Pemkot Palembang	260.000	100.000	68,42%	26.000.000.000
2.	PT SPPJ	120.000	100.000	31,58%	12.000.000.000
	Total	**380.000**		**100%**	**38.000.000.000**

h. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi bertanggungjawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 22 April 2022

LAMPIRAN

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
Per 31 Desember 2021

KETERANGAN	Kredit	Penempatan pd Bank Lain	Jumlah 2021	Jumlah 2020
1. AKTIVA PRODUKTIF				
- Lancar	35.191.469.966	34.154.157.946	69.345.627.912	63.794.441.206
- Dalam Perhatian Khusus	5.830.853.775		5.830.853.775	10.477.779.172
- Kurang lancar	1.306.718.530		1.306.718.530	1.166.198.680
- Diragukan	3.748.627.718		3.748.627.718	1.741.071.831
- Macet	4.120.887.890		4.120.887.890	8.376.431.429
JUMLAH	50.198.557.879	34.154.157.946	84.352.715.825	85.555.922.318
2. AKTIVA PRODUKTIF YG DIKLASIFIKASIKAN				
- Kurang Lancar (50%)	653.359.265		653.359.265	583.099.340
- Diragukan (75%)	2.811.470.789		2.811.470.789	1.305.803.873
- Macet (100%)	4.120.887.890		4.120.887.890	8.376.431.429
JUMLAH	7.585.717.944		7.585.717.944	10.265.334.642
3. AGUNAN YANG DIPERHITUNGKAN				
- Lancar	-		-	-
- Dalam Perhatian Khusus	2.325.372.837		2.325.372.837	8.083.740.191
- Kurang lancar	-		-	425.281.443
- Diragukan	2.005.549.014		2.005.549.014	102.318.428
- Macet	2.513.054.327		2.513.054.327	5.016.560.933
JUMLAH	6.843.976.178		4.518.603.341	13.627.900.996
4. PPAPWD				
(setelah diperhitungkan agunan)				
- Lancar (0,5%)	-	-	-	-
- Dalam Perhatian Khusus (3%)	105.164.428		105.164.428	23.940.390
- Kurang lancar (10%)	130.671.853		130.671.853	74.091.724
- Diragukan (50%)	871.539.352		871.539.352	819.376.701
- Macet (100%)	1.607.833.563		1.607.833.563	3.359.870.496
JUMLAH	2.715.209.196		2.715.209.196	4.277.279.310
RASIO - RASIO	Aktiva Produktif Yg Diklasifikasikan		8,99%	12,00%
	Aktiva Produktif			
	Penyisihan Penghapusan Aktiva		100,00%	100,00%
	PPAP Yg Wajib Dibentuk			
	NPL Bruto		9.176.234.138	11.283.701.940
	Rasio NPL Bruto		18,28%	18,70%
	NPL Netto		6.566.189.370	7.030.363.019
	Rasio NPL Netto		13,08%	11,65%
PPAP Yang dibentuk BPR			2.715.209.204	4.277.279.310
PPAP YANG (KURANG) LEBIH BENTUK			8	0

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)
Per 31 Desember 2021

KETERANGAN	Nominal	Bobot Resiko	ATMR 2021	ATMR 2020
1. Kas	665.671.400	0%	-	-
2. Sertifikat BankIndonesia (SBI)		0%		
3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet.	518.573.474	0%	-	-
4.Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	2.029.700.000	0%	-	-
5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR.		15%	-	-
6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	34.154.157.946	20%	6.830.831.589	5.044.723.833
7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.		20%	-	-
8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.		20%	-	-
9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	9.555.271.948	30%	2.866.581.584	4.126.906.785
10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%.		50%	-	-
11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan.	1.327.931.165	50%	663.965.583	948.233.829
12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.		50%	-	-
13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil.	4.172.630.823	70%	2.920.841.576	2.106.358.332
14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan secara fidusia sesuai peraturan perundang-undangan.	219.973.401	70%	153.981.381	326.040.854
15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	-	100%	-	30.631.970.238
16.Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet.	32.223.560.757	100%	32.223.560.757	8.376.431.429
17. Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.	348.437.685	100%	348.437.685	345.420.775
18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	1.253.442.647	100%	1.253.442.647	820.000.000
19. Aset lainnya selain tersebut diatas.	1.476.590.642	100%	1.476.590.642	1.492.835.981
Jumlah ATMR	**87.945.941.888**		**48.738.233.444**	**54.218.922.055**

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
PERMODALAN (CAR)
Per 31 Desember 2021

KETERANGAN			NOMINAL	NOMINAL
I	MODAL		2021	2020
	1	Modal Inti		
		1.1. Modal Disetor	38.000.000.000	38.000.000.000
		1.2. Modal Sumbangan		
		1.3. Dana Setoran Modal		
		1.4. Cadangan Umum	-	-
		1.5. Cadangan Tujuan	-	-
		1.6. Laba Ditahan		
		1.7. Laba Tahun-tahun Lalu	-	-
		1.8. Rugi Tahun-tahun Lalu	(4.462.280.559)	(5.031.330.855)
		1.9. Laba Tahun Berjalan Setelah Dikurangi Kekurangan PPAP (max 50% Setelah THP)	-	284.525.148
		1.10. Rugi Tahun Berjalan	(4.588.210.021)	-
		Sub Total Modal Inti	28.949.509.420	33.253.194.293
		1.11. Goodwill	-	-
		1.12. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun sejakpengambilalihan	(1.489.850.000)	(1.425.000.000)
		1.12. Kekurangan PPAP	-	(0)
		Jumlah Modal Inti	27.459.659.420	31.828.194.293
	2	Modal Pelengkap		
		2.1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap		
		2.2. PPAP umum (maks 1,25% dari ATMR)	-	-
		2.3. Modal Kuasi/Modal Pinjaman		
		2.4. Pinjaman Subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti)		
		Jumlah Modal Pelengkap	-	-
		2.5. Jumlah Modal Pelengkap yg Diperhitungkan (maks. 100% dari modal inti)		
	3	Jumlah Modal	27.459.659.420	31.828.194.293
II	MODAL MINIMUM (12% x ATMR)		5.848.588.013	6.506.270.647
III	KELEBIHAN ATAU (KEKURANGAN) MODAL		21.611.071.406	25.321.923.647
IV	**RASIO MODAL (CAR=Modal / ATMR x 100%)**		**56,34%**	**58,70%**

BMPK:		
Pihak Terkait (10% * Modal)	2.745.965.942	3.182.819.429
Pihak Tidak Terkait (20% * Modal)	5.491.931.884	6.365.638.859

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
RASIO KREDIT TERHADAP DANA DITERIMA
Per 31 Desember 2021

KETERANGAN			SALDO 2021	SALDO 2020
1	Simpanan Pihak ke 3			
	a	Tabungan	6.816.376.713	6.481.878.662
	b	Simpanan Berjangka (Deposito)	35.051.003.598	29.369.104.691
2	Pinjaman diterima bukan dari Bank > 3 bln		-	-
3	Deposito dan Pinjaman diterima dari bank lebih dari 3 bln		12.900.000.000	11.900.000.000
4	Modal Pinjaman			
5	Modal Inti		27.459.659.420	31.828.194.293
	Jumlah dana yang diterima		82.227.039.731	79.579.177.647
6	Aktiva Produktif (selain ABA)			
	a	Kredit yg diberikan	50.198.557.879	60.332.303.151
	b	Kredit yg Diberikan kpd Bank Lain		
	c	Lainnya		
	Jumlah Aktiva Produktif		50.198.557.879	60.332.303.151
LDR (Aktiva Produktif / Dana yg Diterima)			**61,05%**	**75,81%**

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
LIKUIDITAS (CASH RATIO)
Per 31 Desember 2021

KETERANGAN	SALDO 2021	SALDO 2020
1. Alat Likuid		
a. Kas	665.671.400	846.193.900
b. Antar Bank Aktiva		
- Giro	13.655.696.722	5.237.311.791
- Tabungan	2.098.461.224	1.586.307.376
- dikurangi Tabungan ABP	-	-
Jumlah Alat Likuid	16.419.829.346	7.669.813.066
2. Utang Lancar		
a. Kewajiban Segera Dibayar	1.217.293.962	1.151.893.276
b. Utang Bunga	165.965.933	220.100.867
c. Simpanan Pihak ke 3		
- Tabungan	6.816.376.713	6.481.878.662
- Deposito Berjangka	35.051.003.598	29.369.104.691
Jumlah Hutang Lancar	43.250.640.206	37.222.977.496
CASH RATIO	**37,96%**	**20,61%**

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PALEMBANG
ROA dan BOPO
Per 31 Desember 2021

BULAN	TOTAL ASET 2021	TOTAL ASET 2020
JANUARI	85.845.753.246	94.327.751.033
PEBRUARI	83.779.964.961	93.428.836.153
MARET	88.179.591.548	95.942.172.275
APRIL	87.275.585.187	94.271.337.704
MEI	89.117.012.602	91.222.616.496
JUNI	88.824.927.416	95.358.431.949
JULI	89.279.726.491	97.145.633.803
AGUSTUS	89.377.199.116	96.878.408.549
SEPTEMBER	88.005.468.341	94.132.173.291
OKTOBER	89.440.250.399	90.158.919.656
NOPEMBER	85.989.500.688	88.969.463.103
DESEMBER	87.103.962.463	86.176.371.765
TOTAL	1.052.218.942.459	1.118.012.115.777
Rata2 Aset	87.684.911.872	93.167.676.315
ROA	**-5,23%**	**0,61%**
Biaya Operasional	18.160.782.864	14.061.134.927
Pendapatan Operasional	13.577.960.740	14.645.491.174
BOPO	**133,75%**	**96,01%**